

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU 2019 DI KABUPATEN
ACEH BESAR**

SKRIPSI



DI SUSUN OLEH :

PUTRI MARIAM GUNAWAN

NIM. 190801095

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH 2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PUTRI MARIAM GUNAWAN

NIM : 190801095

Prodi : Ilmu Politik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu 2019 Di Kabupaten Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan seungguhnya.

Banda Aceh, 31 Juli 2024
Yang Menyatakan,



PUTRI MARIAM GUNAWAN

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU 2019 DI KABUPATEN ACEH
BESAR**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan
Skripsi Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

PUTRI MARIAM GUNAWAN

NIM. 190801095

Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Banda Aceh, 28 November 2024

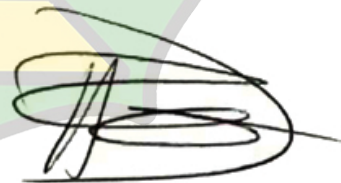
Disetujui Untuk Disidangkan Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag
NIP. 197403271999031005



Renaldi Safriansyah, SE, M.HSc
NIDN. 2007017903

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU 2019 DI KABUPATEN ACEH
BESAR**

SKRIPSI


PUTRI MARIAM GUNAWAN
NIM. 190801095

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 28 November 2024

Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua


Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag
NIP. 197403271999031005


Sekretaris


Renaldi Satriansyah, SE, M.HSc
NIDN. 2007017903

Penguji I



Eka Januar, M.Soc.Sc
NIP. 198401012015031003

Penguji II


Danil Akbar Taqwadin, B.IAM., M.Sc
NIP. 198904082023211022

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh




Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag
NIP. 197403271999031005

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang penulis panjatkan puji dan puja syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita curahkan kepada baginda besar kita yakni Muhammad SAW, yang telah menyelamatkan kita dari alam kebodohan dan sampailah kita pada saat ini ke alam yang penuh dengan nikmat ilmu pengetahuan, dimana pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah penelitian yang berjudul "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu 2019 Di Kabupaten Aceh Besar"

Adapun tujuan penulisan penelitian ini disusun sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan tugas mata kuliah Seminar Penelitian dan untuk menambah wawasan saya dan pembaca dalam bidang pembangunan politik khususnya di daerah Kabupaten Aceh Besar. Terlepas dari selesainya proposal ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan penelitian ini.

Oleh karena itu dengan tangan terbuka penulis menerima segala saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan hal positif untuk kita semua dan laporan ini bisa bermanfaat bagi para bermanfaat.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 28 November 2024

Penulis

Putri Mariam Gunawan

ABSTRAK

Tingkat partisipasi pemilu legislatif 2019 Aceh Besar terlihat tinggi dibandingkan dari kabupaten lain. KIP Kabupaten Aceh Besar berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat mencapai 86 % yang sebelumnya pada Pileg tahun 2018 tingkat partisipasi masyarakat hanya mencapai 74 %. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses sosialisasi pemilu 2019 di Kabupaten Aceh Besar dan untuk mengetahui apa saja menjadi faktor-faktor yang menyebabkan tingkat partisipasi pemilu 2019. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Partisipasi politik masyarakat Kabupaten Aceh Besar 2019 yaitu diantaranya pada tiap-tiap Paslon (pasangan calon) selalu menyadari dan bersosialisasi tentang hak pilih mereka, selain itu pemikiran yang dibangun di tengah-tengah masyarakat merupakan pemikiran yang kebanyakan mengandung tentang sisi positif tentang pasangan calon, Peran ulama yang menghimbau secara nasional maupun di Aceh secara besar-besaran untuk mendukung pasangan paslon tertentu, Serta Kesiapan KIP Aceh Besar yang dinilai cukup baik. Adapun faktor yang mempengaruhi peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Presiden 2019 di Kabupaten Aceh Besar karena adanya persiapan KIP Kabupaten Aceh Besar yang telah maksimal dalam menyelenggarakan pemilihan Presiden tahun 2019, Kesadaran masyarakat dalam berpolitik, adanya komunitas organisasi masyarakat, adanya upgrade data pemilih yang dilakukan KIP Kabupaten Aceh Besar dan turun lapangan langsung membagikan undnagan kepada masyarakat.

Kata Kunci: *Partisipasi Masyarakat, Pemilu 2019, Kabupaten Aceh Besar,*

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR ISI

LEMBAR KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Kajian-kajian sebelumnya	10
2.2. Landasan Teori.....	15
2.2.2. Partisipasi Politik	18
2.2.3. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik.....	25
2.2.4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik	27
2.2.5. Partai Politik dan Pemilu	28
2.2.6. Partisipasi Politik Ditinjau Dari Perspektif Teori Pertukaran George Homans.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Pendekatan Penelitian.....	34
3.2 Fokus Penelitian.....	35
3.3 Lokasi Penelitian	36
3.4 Jenis dan Sumber Data	36
3.5 Informan Penelitian	37
3.6 Sumber Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Profil Kabupaten Aceh Besar	39
4.2 Gambaran Umum Komisi Independen Pemilihan Aceh Besar	43
4.3. Proses Sosialisasi Pemilu 2019 di Kabupaten Aceh Besar.....	50
4.4. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tingkat Partipasi Pemilu Di Aceh Besar	57

BAB V PENUTUP	69
5.1. Kesimpulan.....	69
5.2. Saran.....	70
 DAFTAR PUSTAKA.....	 72



BAB I

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan satu di antara banyak negara di Dunia yang menganut sistem politik demokrasi, yang mana pemerintahannya berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Maka, setiap warga negara berhak memilih wakil-wakil rakyat yang akan mewakilinya dalam memegang suatu kekuasaan. Tim riset *The Economist* melakukan pemeringkatan Indeks Demokrasi pada tahun 2017 lalu. Dari pemeringkatan tersebut, Indonesia mengalami penurunan yaitu, peringkat 48 pada tahun 2016 menjadi peringkat 68 pada tahun 2017, lebih rendah daripada Timor Leste yang berada pada peringkat 43. Peristiwa yang menjadi sorotan atas penurunan peringkat itu ialah proses Pemilihan Umum (Pemilu) kepala daerah DKI Jakarta. Dalam kaitannya dengan demokrasi, partisipasi politik memengaruhi legitimasi suatu pemerintahan. Makin tinggi tingkat partisipasi politik menandakan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya, ketika rakyat acuh terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan menandakan tingkat partisipasi politik yang rendah. Dilansir dari cnnindonesia.com, seorang pengamat politik dari Universitas Khairun Ternate, Ridha Adjam mengatakan sikap apatis itu terjadi karena pengalaman yang dirasakan publik. Bahwa selama ini, siapapun yang

terpilih dalam pemilu tidak akan membawa perubahan berarti untuk kehidupan mereka.¹

Partisipasi politik juga berkaitan dengan pemenuhan hak politik warga negara. Hal tersebut tercermin pada keterlibatan mereka dalam Pemilu, yang mana juga salah satu sarana demokrasi. Dari pandangan ketatanegaraan, Pemilu merupakan tolak ukur demokratisasi suatu negara. Maka, tidak hanya menjadi kunci dari terciptanya demokrasi, tapi pemilu juga sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap Negara dan Pemerintah. Pemilu merupakan suatu cara bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga Eksekutif maupun Legislatif. Tahun 2019 menjadi tahun pertama bagi Indonesia melaksanakan Pemilihan Serentak. Yaitu, memilih Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Legislatif secara bersamaan. Hal tersebut bermula dari permohonan uji materi UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 14/PUU-XI/2013 untuk menyetujui pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif dilakukan secara bersamaan/serentak. Majelis Hakim membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), serta Pasal 112 UU No. 42 Tahun 2008 yang mengatur tentang pelaksanaan Pilpres tiga bulan setelah Pileg.²

Pemilihan Umum ini pada dasarnya merupakan demokrasi secara riil dari peran serta masyarakat dalam proses kehidupan politik, sekaligus merupakan sarana

¹ Indeks demokrasi Indonesia cnnindonesia.com

² Cora Elly Noviaty, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013.

dari suatu proses sosialisasi politik rakyat dalam menumbuhkan tingkat kesadaran akan hak dan kewajiban mereka dalam berpolitik, yang ditandai dengan tingginya tingkat responsif dan kreativitas mereka dalam menanggapi fenomena-fenomena politik.³

Langkah-langkah pembangunan politik akan mempengaruhi pula perkembangan sistem-sistem politik yang berlaku di berbagai Negara, sementara Gabriel Almond, menggariskan penilainnya, bahwa ciri-ciri sistem politik yang maju ada pada masyarakat pada masyarakat modern, sedangkan ciri-ciri sistem politik tidak maju ada pada masyarakat tradisional.⁴

Sekaligus dapat ditegaskan bahwa pemilihan umum merupakan sarana partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kedaulatan masyarakat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dan kampanye merupakan sesuatu yang esensial dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, masa kampanye yang dilaksanakan selama 14 hari dan berakhir tiga hari sebelum pemungutan suara, pasangan calon kepala daerah bersama tim kampanyenya akan berusaha memperkenalkan dirinya dan

³ Syarif, Hidayatullah. 2018. *Komunikasi Politik Dalam Pilkada (Studi Kasus Pemenangan Pasangan Mirna Dan Masrur Pada Pilkada Kabupaten Kendal Tahun 2015)*. Phd thesis. Universitas wahid hasyim semarang.

⁴ Prof. Dr. Jimly Assihiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

memaparkan visi-misi mengenai rancangan kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan masa kepemimpinannya jika terpilih.⁵

Untuk mewujudkan demokrasi yang mempresentasikan partisipasi rakyat pemilu sejatinya berjalan dengan mengandalkan kekuatan dari pemerintah, namun hasilnya akan jauh lebih baik jika mendapat dukungan dan partisipasi dari setiap golongan masyarakatnya. Keterlibatan masyarakat pada setiap pembangunan akan selalu dikaitkan dengan upaya menimbulkan rasa saling memiliki terhadap sarana dan prasarana yang dibangun, yang pada akhirnya akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainability*). Partisipasi politik biasanya terjadi dalam dua bentuk, secara konvensional dan non konvensional. Partisipasi konvensional biasanya terlibat dalam pemilihan wakil-wakil rakyat seperti pemberian suara di pemilihan umum, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan, komunikasi dengan pejabat politik, dan kegiatan-kegiatan administratif. Sedangkan partisipasi non konvensional bertindak dengan unsur negatif dan mengandung kekerasan seperti demonstrasi, konfrontasi, mogok kerja, dan perang.⁶ Partisipasi masyarakat juga dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu : partisipasi dalam pemilihan umum, partisipasi suatu kelompok, kontak antara masyarakat dan pemerintah, dan partisipasi secara langsung dilingkungan pemerintah.⁷

⁵ Budiyono, B. 2013. *Mewujudkan Pemilu 2014 Sebagai Pemilu Demokratis*. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 7(3).

⁶ Almond, Gabriel A, 2020 *.Sosialisasi Kebudayaan dan Partisipasi Politik*, dalam Mochtar Mas'ood & Mac Andrews (Eds), *Perbandingan Sistem Politik* Yogyakarta: UGM University Press.

⁷ Kumorotomo, Wahyudi. 2005. *Etika Administrasi Negara*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Dalam partisipasi politiknya, setiap elemen baik dari pemerintah provinsi terkhusus di Aceh terus mencanangkan berbagai program untuk mendorong tingkat partisipasi masyarakat. Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh telah menargetkan Kabupaten Aceh Besar sebagai *Pilot Project* Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3). Hal ini bertujuan agar masyarakat di setiap desa dapat melek atau peduli pada politik terutama dalam pemilu, mendepankan rasa kemandirian dan rasionalitasnya, terhindar dari intervensi atau paksaan dari kalangan tertentu, memfilter berita-berita atau informasi hoaks, jauh dari politik uang dan politisasi berbau SARA.⁸



⁸<https://kip.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2021/06/DATA-INFOGRAFIK-PEMILU-SERENTAK-2019-PROVINSI-ACEH-1.pdf>

Sedangkan terkait dengan wilayah Kabupaten Aceh Besar yang ingin penulis teliti, melihat kinerja Kabupaten Aceh Besar, terlihat juga dari grafik diatas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih legislatif 2019 Aceh Besar terlihat tinggi dibandingkan dari kabupaten lain. KIP Kabupaten Aceh Besar berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat mencapai 86 % (Sumber: database KPU Kota Aceh Besar) yang sebelumnya pada Pileg tahun 2018 tingkat partisipasi masyarakat hanya mencapai 74 %.⁹ Peningkatan partisipasi masyarakat di sini juga didasarkan pada tiap-tiap Paslon (pasangan calon) selalu menyadari dan bersosialisasi tentang hak pilih mereka, hal ini juga merupakan langkah awal dalam mewujudkan proses demokrasi yang benar dan substansial karena demokrasi yang sebenarnya bukan terletak pada demokrasi yang prosedural yang selama ini kita terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini juga menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh KIP Aceh Besar telah membuahkan hasil yang patut kita apresiasi

Terkait Data pemilu 2019 bahwa partisipasi pemilih di Kabupaten Aceh Besar menacapai 86%. Ini adalah angka yang tinggi dibandingkan beberapa Kabupaten/Kota lain di Aceh, Selain memiliki partisipasi yang cukup tinggi, hal ini karena di Aceh Besar memiliki banyak pemilih yang cerdas serta memiliki kepercayaan terhadap pemerintah dan penyelenggara Pemilu.¹⁰

⁹ <https://kip.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2021/06/DATA-INFOGRAFIK-PEMILU-SERENTAK-2019-PROVINSI-ACEH-1.pdf>

¹⁰ <https://kip.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2021/06/DATA-INFOGRAFIK-PEMILU-SERENTAK-2019-PROVINSI-ACEH-1.pdf>

Namun belum di ketahui mengapa tingkat partisipasi pemilu legislatif di Aceh Besar itu tinggi, oleh karenanya belum ada studi tentang faktor yg menyebabkan tingginya tingkat partisipasi pemilu legislatif di Aceh Besar.

Masyarakat di Kabupaten Aceh Besar dalam hal ini mendapat informasi dan wawasan terkait dengan tujuan dan manfaat dari pemilihan umum, sehingga mereka dapat menyuarakan pilihan mereka secara merata. Pada akhirnya, partisipasi masyarakat secara politik dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini bisa terjadi dikarenakan berbagai faktor-faktor partisipasi masyarakat dapat diimplementasikan dengan baik, seperti informasi dari media massa maupun tingkat pemahaman tentang kegiatan pemilihan umum itu sendiri.¹¹

Perwujudan demokrasi di tingkat lokal, salah satunya adalah dengan melaksanakan pemilukada di daerah-daerah. Sebagaimana pesta demokrasi di kabupaten Aceh Besar yang di laksanakan pada tahun 2019 lalu. Perwujudan demokrasi itu berjalan dengan lancar. Hal ini sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah Aceh Besar salah satunya Desa Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah menurut informasi dan kabar yang beredar dalam masa pemilu. Meskipun tidak dapat dipertanggung jawabkan hipotesa tersebut, namun pada lazimnya kebanyakan masyarakat desa yang dalam sehari-harinya hanya bertani dan berkebun cenderung apatis terhadap politik. Dalam artian kesadaran politik mereka terlihat sangat tinggi.¹²

¹¹<https://acehbesarkab.go.id/berita/kategori/umum/ketua-bawaslu-aceh-besar-memiliki-pemilih-cerdas-dan-tingkat-partisipasi-yang-tinggi>

¹² <https://acehbesarkab.go.id/berita/kategori/umum/ketua-bawaslu-aceh-besar-memiliki-pemilih-cerdas-dan-tingkat-partisipasi-yang-tinggi>

Begitu juga Fenomena yang demikian, tentu akan berdampak atau berpengaruh terhadap tinggi rendahnya masyarakat di Desa Garot dalam pemilu kabupatada Kabupaten Aceh Besar oleh karena itu, partisipasi mereka sangat penting untuk ditilik guna untuk mengetahui seberapa jauh partisipasi mereka dalam mengawal pemilu kabupatada nagan raya. Kesadaran politik yang tinggi tentunya sangat diharapkan. Jika partisipasi mereka tinggi maka kesadaran politik mereka juga tinggi hal ini juga disebabkan karena sosialisasi yang terus dilakukan oleh KIP sehingga Masyarakat dengan bijak menggunakan hak pilih nya, selain itu kebanyakan Masyarakat Aceh Besar memiliki tingkat Pendidikan yang cukup baik hal ini berdampak pada Masyarakat dimana mereka memilih atas dasar pilihan mereka.¹³

Salah satu faktor kinerja pemilu 2019 salah satunya yaitu sosialisasi yang baik Dimana hal itu dilakukan oleh KIP, Suksesnya sosialisasi menjadi garda terdepan suksesnya pemilu di suatu negara demokrasi karena hasil dari sosialisasi berpengaruh cukup besar terhadap pemahaman pemilu masyarakat. Sosialisasi sebagai salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya golput untuk itu KIP memaksimal perannya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pemilu melalui dilakukannya sosialisasi yang tentunya dengan cara-cara yang mudah dipahami oleh masyarakat karena esensi dari sosialisasi bertujuan untuk itu.¹⁴

¹³<https://www.tempo.co/arsip/ini-strategi-kip-aceh-besar-tekan-angka-golput-di-pemilu-2019>

¹⁴<https://www.tempo.co/arsip/ini-strategi-kip-aceh-besar-tekan-angka-golput-di-pemilu-2019>

Berdasarkan hal tersebut, studi ini akan mengkaji proses sosialisasi pemilu dan faktor-faktor yang mendukung partisipasi pemilu di Aceh Besar dan apa saja faktor-faktor pendukung dalam partisipasi pemilu. Kajian-kajian tentang pembangunan politik dan partisipasi masyarakat sangat menarik di dalam literatur apalagi di Kabupaten Aceh Besar yang notabene nya memiliki pasrtisipasi politik masyarakat yang cukup tinggi di Profinsi Aceh, Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam melihat seberapa besar peran masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan politik, dengan judul “partisipasi masyarakat dalam pemilu 2019 di Kabupaten Aceh Besar”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka terdapat permasalahan yang akan diangkat sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses sosialisasi pemilu 2019 di Kabupaten Aceh Besar?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tingkat partipiasi pemilu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan penulis diatas, maka terbentuklah tujuan penelitiannya, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses sosialisasi pemilu 2019 di Kabupaten Aceh Besar
2. Untuk mengetahui apa saja menjadi faktor-faktor yang menyebabkan tingkat partipiasi pemilu 2019

1.4 Manfaat Penelitian

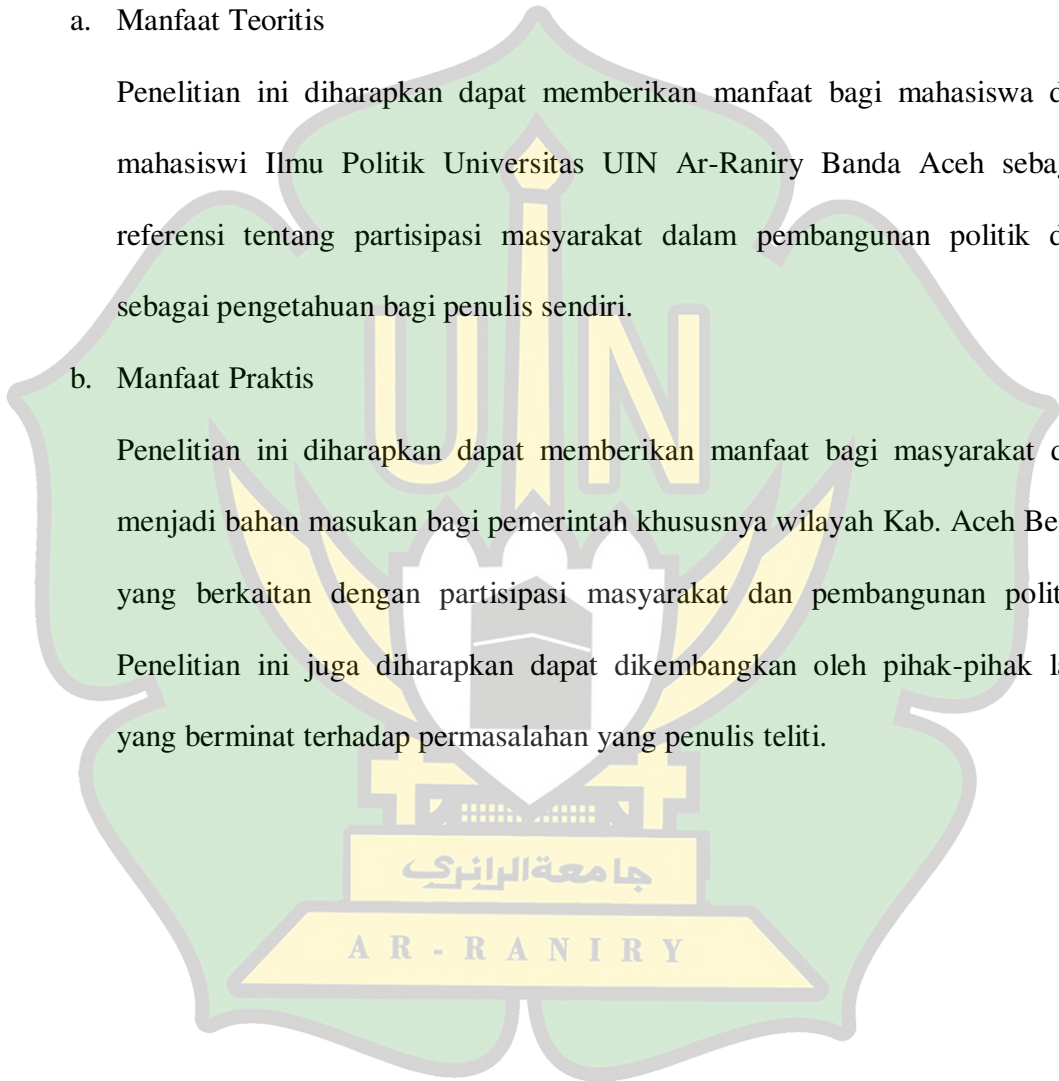
Penulis berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dan mahasiswi Ilmu Politik Universitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai referensi tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan politik dan sebagai pengetahuan bagi penulis sendiri.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi bahan masukan bagi pemerintah khususnya wilayah Kab. Aceh Besar yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dan pembangunan politik. Penelitian ini juga diharapkan dapat dikembangkan oleh pihak-pihak lain yang berminat terhadap permasalahan yang penulis teliti.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian-kajian sebelumnya

Kajian terdahulu merupakan kumpulan penelitian yang telah diketahui sebelumnya dan menjadi landasan atau patokan untuk penelitian ini. Dibawah ini akan dipaparkan beberapa kajian terdahulu sebagai berikut :

1. Ni Ketut Arniti Tahun 2020 yang berjudul “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar”. Temuannya yaitu penelitian tersebut menunjukkan bahwa Rasionalitas masyarakat memberikan pada aspek partisipasi politik sangat mempengaruhi Pertimbangan ekonomi dan alasan politik uang menjadi salah satu motivasi dalam partisipasi politik. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, peta partisipasi pemilih dalam pileg dan pilpres di Kota Denpasar mengalami kenaikan dan penurunan. Kedua, upaya sosialisasi partisipasi politik yang merupakan bagian paling penting dalam sebuah pemilihan umum. Friedman dan Hechter melihat adanya pengaruh lembaga sosial dalam partisipasi politik. Dalam temuan peneliti terdapat lembaga sosial yang turut berpengaruh dalam menaik-turunkan partisipasi politik masyarakat, yakni: Kepala Desa, Calon legislatif, PPS, dan tokoh agama. Ketiga, kedekatan emosional calon pileg dan pilpres turut mempengaruhi partisipasi dan persepsi politik masyarakat. Keempat, rasionalitas masyarakat memberikan pengaruh yang sangat besar dalam menentukan partisipasi politik. Pertimbangan ekonomi dan politik uang

menjadi salah satu motivasi dalam partisipasi politik. Namun, kedekatan calon dengan pemilih menjadi kunci signifikan dalam pengaruhnya terhadap partisipasi politik masyarakat.¹⁵ Penelitian yang dilakukan oleh Ni Ketut Arniti mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama menjelaskan tentang Partisipasi Politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data mulai observasi, wawancara dan dokumentasi. Namun terdapat perbedaan yang hendak peneliti kaji dengan penelitian ini. Penelitian ini berfokus lebih meninjau strategi politik keterwakilan anak muda, sedangkan lingkup wilayah yang hendak peneliti kaji adalah berfokus secara umum yang berlokasi di Kabupaten Besar.

2. Yusrin Yusrin & Salpina Salpina Tahun 2024 yang berjudul “Partisipasi Generasi Millennial dalam Mengawasi Tahapan Pemilu 2024”. Temuannya yaitu penelitian tersebut menunjukkan Keluaran dan manfaat dari pelaksanaan sosialisasi ini adalah mampu membangkitkan kesadaran dini generasi muda untuk mulai aktif dalam proses politik, seperti menggunakan hak pilihnya, menjadi pemantau pemilu, dan mampu memberikan motivasi bagi generasi muda. bekerja secara langsung sebagai Tim Sukses dalam mendukung calon mitra yang mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan pandangannya.¹⁶

¹⁵ Arniti, ni ketut. "partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum legislatif di kota Denpasar." *jurnal ilmiah dinamika sosial* 4.2 (2020): 329-348.

¹⁶ Yusrin, Yusrin, and Salpina Salpina. "Partisipasi generasi millennial dalam mengawasi tahapan pemilu 2024." *Journal on Education* 5.3 (2023): 9646-9653.

Penelitian yang dilakukan oleh Yusrin Yusrin & Salpina Salpina Tahun 2024 mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama menjelaskan tentang Partisipasi Politik dan pemilu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data mulai observasi, wawancara dan dokumentasi. Namun terdapat perbedaan yang hendak peneliti kaji dengan penelitian ini. Yaitu lingkup wilayah yang hendak peneliti kaji adalah berfokus secara umum yang berlokasi di Kabupaten Besar.

3. Penelitian oleh Meytisen Hendra Ngongoloy Tahun 2019 yang berjudul “Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif di Desa Temboan Kecamatan Langowan Selatan”. Temuannya yaitu penelitian bahwa Partisipasi Politik mengalami masalah dimana tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum anggota legislative masih sangat kurang. Apa penyebabnya perlu diidentifikasi agar bisa dicarikan solusi untuk mengatasinya. Untuk itu penelitian ini menjadi sangat penting. Penelitian ini menggunakan metode gabungan antara kuantitatif dan kualitatif dengan harapan data yang diperoleh bisa lebih komprehensif menggambarkan fakta dilapangan. Konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah konsep dari Mirriam Budiardjo (1982) yang memberikan pengertian tentang partisipasi politik adalah merupakan kegiatan seseorang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy), kegiatan ini

mencakup seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan *contacting* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.¹⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Ngongoloy mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama menjelaskan tentang Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif di Desa Temboan Kecamatan Langowan Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data mulai observasi, wawancara dan dokumentasi. Namun terdapat perbedaan yang hendak peneliti kaji dengan penelitian ini. Yaitu lingkup wilayah yang hendak peneliti kaji adalah berfokus secara umum yang berlokasi di Kabupaten Besar.

4. Penelitian oleh Agung Suharyanto yaitu Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah ditemukan Partisipasi politik masyarakat Tionghoa merupakan suatu bagian dari proses demokratisasi masyarakat Indonesia dalam berpolitik. Asas demokrasi dalam politik khususnya dalam Pemilihan yang dikenal dengan asas *luber* yaitu, langsung, umum, bebas, rahasia, dan demokratis telah diterapkan oleh masyarakat Tionghoa di Kelurahan Kampung Tanjung dalam pelaksanaan

¹⁷ Ngongoloy, Meytisen Hendra. "Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif di Desa Temboan Kecamatan Langowan Selatan." *Politico: Jurnal Ilmu Politik* 2.6 (2019): 1053.

Pilkada Kota Binjai Tahun 2010 walaupun tidak seutuhnya.¹⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Suharyanto mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama menjelaskan Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data mulai observasi, wawancara dan dokumentasi. Namun terdapat perbedaan yang hendak peneliti kaji dengan penelitian ini. Yaitu lingkup wilayah yang hendak peneliti kaji adalah berfokus secara umum yang berlokasi di Kabupaten Besar.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan sama-sama menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan mewawancarai secara langsung narasumber sebagai informan. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian penulis akan melakukan penelitian khusus di Aceh Besar dan terdapat perbedaan pada teori yang digunakan dan tahun penelitian.

¹⁸ Suharyanto, Agung. "Partisipasi politik masyarakat Tionghoa dalam pemilihan kepala daerah." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 2.2 (2014): 151-160.

2.2 Landasan Teori.

2.2.1. Pembangunan Politik

Dalam studi pembangunan politik ada beberapa pemahaman, definisi dan pengertian yang saling terkait yaitu, perubahan, pembangunan dan modernisasi politik. Pembangunan dan modernisasi politik merupakan perubahan politik, bukan sebaliknya.¹⁹ Perubahan politik dapat diartikan sebagai terjadinya perbedaan karakteristik dari suatu sistem politik yang satu ke sistem politik lain. Misalnya dari sistem politik otoriter parlementer ke sistem politik demokrasi Pancasila. Permasalahannya adalah apakah perubahan itu bersifat progresif yaitu untuk menuju situasi yang lebih baik dari yang sebelumnya ataukah bersifat regresif yakni menuju situasi yang lebih buruk dari sebelumnya. Contohnya adalah Indonesia masa pemerintahan orde baru yang cenderung otoriter berubah ke masa reformasi yang cenderung lebih demokratis, dimana kedaulatan rakyat lebih dijunjung tinggi. Disamping itu, menurut Huntington dan Dominguez Konsep pembangunan politik dikatakan mempunyai konotasi secara geografis, devertatif, teologis dan fungsional:

- a) Konsep Geografis berarti terjadi proses perubahan politik pada Negara-negara sedang berkembang dengan menggunakan konsep-konsep dan metode yang pernah digunakan oleh Negara-negara maju, seperti konsep mengenai sosialisasi politik, komunikasi politik, rekrutment politik dan sebagainya. Secara geografis, negara yang ada di wilayah benua Eropa dijadikan sebagai

¹⁹ Miriam Budiardjo (1986), DasarDasar Ilmu Politik, P.T. Gramedia, Jakarta

dasar perubahan politik yang digunakan konsepnya oleh negara-negara yang baru merdeka dan negaranegara berkembang.

- b) Konsep *Derivative* dimaksudkan bahwa pembangunan politik merupakan aspek dan konsekuensi politik dari proses perubahan yang menyeluruh, yakni modernisasi yang membawa konsekuensi pada pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, peningkatan pendidikan, media massa, perubahan status sosial dan aspek-aspek lainnya. aspek ekonomi menjadi tujuan pokok dari konsep ini.
- c) Konsep Teologis dimaksudkan sebagai proses perubahan menuju pada suatu atau beberapa tujuan dari sistem politik. Tujuan-tujuan itu misalnya mengenai stabilitas politik, integrasi politik, dan sebagainya. Juga termasuk didalamnya tujuan pembangunan suatu bangsa meliputi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan, demokrasi, stabilitas dan otonomi nasional.²⁰
- d) Konsep Fungsional diartikan sebagai suatu gerakan perubahan menuju kepada suatu sistem politik yang ideal dan ingin dikembangkan oleh suatu Negara misalnya Indonesia ingin mengembangkan sistem politik demokrasi konstitusional.

Sebagaimana definisi perencanaan, definisi pembangunan juga ada bermacam-macam. Menurut Bryant dan White dalam Suryono, pembangunan berarti upaya meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya dengan memiliki lima implikasi utama yaitu:

²⁰ Miriam Budiardjo (1986), Dasar-Dasar Ilmu Politik, P.T. Gramedia, Jakarta

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan manusia secara optimal baik individu maupun kelompok (*capacity*).
2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan, pemerataan nilai dan kesejahteraan (*equity*).
3. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*).
4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*).
5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara satu kepada negara lain, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan menghormati (*interdependence*).

Bryant dan White menegaskan bahwa lima prinsip dasar di atas harus berorientasi pada pembangunan yang berpusat pada manusia yaitu bahwa proses pembangunan harus meningkatkan kemampuan manusia dalam menentukan masa depannya sendiri.

Katz mendefinisikan pembangunan sebagai perubahan sosial yang besar dari suatu keadaan dengan keadaan lainnya yang dipandang lebih bernilai. Apa yang dipandang lebih bernilai itu adalah sifat spesifik dari waktu ke waktu, dari budaya yang satu ke budaya yang lain, atau dari negara yang satu ke negara yang lain. Rogers

Menurutnya, pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial dalam suatu masyarakat, yang diselenggarakan dengan jalan memberi kesempatan yang seluas-luasnya pada warga masyarakat untuk berpartisipasi, untuk mendapatkan kemajuan baik secara sosial maupun material, bagi mayoritas warga masyarakat dengan mengendalikan lingkungan hidup mereka secara lebih baik (termasuk masalah pemerataan, kebebasan dan berbagai masalah kualitas hidup yang lain).

2.2.2. Partisipasi Politik

Hierarki partisipasi politik tersebut berlaku di berbagai tipe sistem politik, tetapi arti masing-masing tingkat tersebut bisa berbeda dari sistem yang satu ke sistem politik yang lain. Selain itu, Rush dan Althoff juga mengingatkan bahwa partisipasi pada suatu tingkatan tidak merupakan prasyarat bagi partisipasi pada tingkatan yang lebih tinggi. Untuk menganalisis tingkatan-tingkatan yang berpartisipasi politik, Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson mengajukan dua kriteria penjelas.²¹

1. Dilihat dari dua lingkup atau proporsi dari satu kategori warga Negara yang melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan partisipasi politik.
2. Intensitas, ukuran, jangka waktu, dan arti penting dari kegiatan khusus itu bagi sistem politik.

Hubungan antara kedua kriteria ini cenderung diwujudkan dalam hubungan “berbanding terbalik”. Lingkup partisipasi politik yang besar biasanya terjadi dalam

²¹ Josep, Partisipasi Politik Di Indonesia dan Upaya Pengembangannya, Indocamp, 2018

intensitas yang kecil atau yang rendah, misalnya partisipasi dalam pemilihan umum. Sebaliknya, jika lingkup partisipasi politik rendah atau kecil, intensitasnya semakin tinggi, misalnya kegiatan para aktivis parpol, pejabat parpol, kelompok penekan. Jadi, terjadi hubungan, “semakin luas ruang lingkup partisipasi politik, semakin rendah atau kecil intensitasnya. Sebaliknya, semakin kecil ruang lingkup partisipasi politik, maka intensitasnya semakin tinggi.”

Studi voting yang mendalam di beberapa Negara memberikan bukti yang kuat untuk mendukung satu jajaran luas dari hipotesa-hipotesa. Lebih khusus mengenai asosiasi antara status sosio-ekonomis dengan tingkah laku elektoral yang telah didokumentasikan secara luas dan banyak sekali perhatian telah dicurahkan pada individu yang menyimpang dari norma voting kelas. Studi ini mengemukakan, bahwa perilaku politik seseorang itu ditentukan oleh interaksi dari sikap sosial dan sikap politik individu yang mendasar.²²

Asosiasi antara berbagai karakteristik pribadi dan sosial seseorang (seperti status sosio-ekonomis) dan tingkah laku politik adalah hasil dari motivasi sadar atau tidak sadar, atau kombinasi dari keduanya. Betapapun juga asosiasi ini tidak menyajikan penjelasan, juga tidak meletakkan suatu hubungan sebab-akibat, walaupun asosiasi lebih rendah berasosiasi dengan partai kiri, dan golongan yang berstatus lebih tinggi berasosiasi dengan partai kanan, tidaklah mengherankan.

²² Ibid hal 43

Individu memperoleh orientasi politik dan pola tingkah-laku politiknya melalui proses sosialisasi politik, dan pengalamannya mengenai gejala sosial dan politik melalui berbagai tingkatan dan tipe partisipasi politik (atau melalui ketidakikutsertaanya dalam partisipasi sedemikian itu), merupakan bagian dari proses sosialisasi yang berkesinambungan, serta merupakan faktor yang penting dalam mempengaruhi partisipasinya di kemudian hari. Selanjutnya, individu itu jelas tidak dihadapkan pada gejala sosial dan politik yang tidak berubah, karena peristiwa tadi mengalami perubahan dalam hal permasalahan personal dan waktu sampai pada keunikan dari suatu peristiwa politik tertentu.²³

Faktor utama yang mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah kepuasan finansial. Orang yang bersangkutan pun akan menjadi apatis, hal ini tidak terjadi pada orang yang memiliki keamanan ekonomi. Sejumlah penelitian menemukan bahwa individu yang mempunyai tingkat pendidikan, pendapatan dan pekerjaan yang lebih bergengsi umumnya lebih berpartisipasi dibanding individu yang tidak berpendidikan, berpenghasilan rendah dan pekerja kasar. Ketiga komponen di atas terangkum dalam variabel status sosial ekonomi. Kesimpulannya, status sosial ekonomi mempengaruhi partisipasi politik secara positif. Beberapa studi juga menemukan bahwa masing-masing komponen status sosial ekonomi merupakan variabel independent yang mempengaruhi partisipasi politik secara berbeda.

²³ Budiardjo, Miriam. 2005. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Pendidikan adalah variabel terpenting yang mempengaruhi partisipasi politik, dua individu yang mempunyai tingkat pendapatan sama memiliki tingkat partisipasi yang berbeda jika tingkat pendidikannya berbeda. Didalam suatu masyarakat, tingkat partisipasi politik cenderung bervariasi dengan status sosio ekonomi. Mereka yang berpendidikan lebih tinggi, berpenghasilan lebih besar dan mempunyai status pekerjaan yang lebih tinggi biasanya lebih partisipatif dari pada mereka yang miskin, tak berpendidikan dan memiliki pekerjaan status rendah. Orang-orang yang berstatus lebih tinggi khususnya yang berpendidikan lebih tinggi, lebih besar kemungkinannya untuk merasa bahwa adalah kewajiban seorang warga Negara untuk berpartisipasi dalam politik.²⁴

Dikemukakan pertama, untuk memberikan suara diperlukan waktu dan upaya, dan orang-orang yang berpendidikan lebih baik kurang berminat untuk menyediakan waktu dan upaya itu, dibandingkan dengan orang-orang yang berpendidikan rendah, yang mungkin menganggap hari pemungutan suara itu sebagai hari pesta. Kedua, tekanan-tekanan kelompok, penyuapan-penyuapan dapat menghasilkan banyak partisipasi yang dimobilisasikan di dalam kegiatan-kegiatan pemilihan oleh mereka yang kurang berpendidikan, sementara efeknya tidak sama terhadap mereka yang berpendidikan lebih baik.²⁵

²⁴ Hermawan, Budi. 2012. Partisipasi Politik. Gramedia. Jakarta

²⁵ Ibid hal57

Mas'ood dan MacAndrews, membedakan partisipasi politik atas dua bentuk:

- a) Partisipasi politik konvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern.
- b) Partisipasi politik nonkonvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal bahkan dapat berupa kegiatan ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner.²⁶

Menurut Jack Plano voting behavior atau perilaku memilih adalah: “Salah satu bentuk perilaku politik yang terbuka.” Sedangkan menurut Haryanto voting adalah kegiatan warga Negara yang mempunyai hak untuk memilih dan di daftar sebagai seorang pemilih, memberikan suaranya untuk memilih atau menentukan wakil-wakilnya.²⁷

Pemberian suara kepada salah satu kontestan merupakan suatu kepercayaan untuk membawa aspirasi pribadi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kepercayaan yang diberikan, juga karena adanya kesesuaian nilai yang dimiliki arah tempat memberikan suara. Nilai yang dimaksud di sini adalah preferensi yang dimiliki organisasi terhadap tujuan tertentu atau cara tertentu melaksanakan sesuatu, jadi kepercayaan pemberi suara akan ada jika seseorang telah memahami makna nilai yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan.²⁸

²⁶ Mohtar Mas'ood Colin MacAndrews, Perbandingan Sistem Politik . Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, 2008

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

Perilaku memilih atau voting behavior dalam pemilu adalah respons psikologis dan emosional yang diwujudkan dalam bentuk tindakan politik mendukung suatu partai politik atau kandidat dengan cara mencoblos surat suara. Menurut J. Kristiadi penelitian mengenai voting behavior dalam pemilu pada dasarnya mempergunakan beberapa mazhab yang telah berkembang selama ini yakni:

- a) Pendekatan Sosiologis, Mazhab sosiologis pada awalnya berasal dari Eropa yang kemudian berkembang di Amerika Serikat, yang pertama kali dikembangkan oleh Biro Penerapan Ilmu Sosial Universitas Colombia (*Colombia's University Bureau of Applied Social Science*), sehingga lebih dikenal dengan kelompok Colombia. Kelompok ini melakukan penelitian mengenai *The People's Choice* pada tahun 1948 dan voting pada tahun 1952. Di dalam 2 karya tersebut terungkap perilaku memilih seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan seperti sosial ekonomi, afiliasi etnis, tradisi keluarga, keanggotaan terhadap organisasi, usia, jenis kelamin, pekerjaan, tempat tinggal, dan lain-lain.
- b) Pendekatan Psikologis, Mazhab ini pertama kali dipergunakan oleh Pusat Penelitian dan Survey Universitas Michigan (*University of Michigan's Survey Research Centre*) sehingga kelompok ini dikenal dengan sebutan kelompok Michigan. Hasil penelitian kelompok ini yang dikenal luas adalah *The Voter's Decide* dan *The American Voter*. Pendekatan mazhab psikologis ini menekankan kepada 3 aspek variabel psikologis sebagai telah utamanya

yakni, ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu yang berkembang dan orientasi terhadap kandidat. Inti dari mazhab ini adalah identifikasi seseorang terhadap partai tertentu yang kemudian akan mempengaruhi sikap orang tersebut terhadap para calon dan isu-isu politik yang berkembang. Kekuatan dan arah identifikasi kepartaian adalah kunci dalam menjelaskan sikap dan perilaku pemilih.²⁹

Campbell menjelaskan proses terbentuknya perilaku pemilih dengan istilah *Funnel of Causality*. Pengandaian itu dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena voting yang di dalam model terletak paling atas dari funnel (Cerobong). Digambarkan bahwa di dalam cerobong terdapat as (axis) yang mewakili dimensi waktu. Kejadian-kejadian yang saling berhubungan satu sama lain bergerak dalam dimensi waktu tertentu mulai dari mulut sampai ujung cerobong. Mulut cerobong adalah latar belakang sosial (ras, agama, etnik, daerah), status sosial (pendidikan, pekerjaan, kelas) dan watak orang tua. Semua unsur tadi mempengaruhi identifikasi kepartaian seseorang yang merupakan bagian berikutnya dari proses tersebut. Pada tahap berikutnya, identifikasi kepartaian akan mempengaruhi penilaian terhadap para kandidat dan isu-isu politik.³⁰

Sedangkan proses yang paling dekat dengan perilaku pemilih adalah kampanye sebelum pemilu maupun kejadian-kejadian yang diberitakan oleh media massa. Masing-masing unsur dalam proses tersebut akan mempengaruhi perilaku

²⁹ Kristiadi, J. 1996. Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih di Indonesia. Prisma 3.

³⁰ Campbell, Neil A., and Reece, Jane B. 2000. Biologi. Jakarta: Erlangga.

pemilih, meskipun titik berat studi kelompok Michigan adalah identifikasi kepartaian dan isu-isu politik para calon, dan bukan latar belakang sosial atau budayanya.

- c) Pendekatan Ekonomi, Pendekatan ini lahir sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap pendekatan sosiologis dan psikologis. Pemikiran baru ini mempergunakan pendekatan ekonomi yang sering pula disebut sebagai pendekatan rasional. Tokoh dalam pendekatan ini antara lain Downs dengan karyanya *An Economic Theory of Democracy* dan Riker & Ordeshook, yang dituangkan dalam tulisan berjudul *A Theory of the Calculus Voting*. Para penganut aliran ini mencoba memberikan penjelasan bahwa perilaku pemilih terhadap partai politik tertentu berdasarkan perhitungan, tentang apa yang diperoleh bila seseorang menentukan pilihannya, baik terhadap calon Presiden maupun anggota parlemen.³¹

2.2.3. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Rush dan Althoff mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut:

- a) Menduduki jabatan politik atau administrative
- b) Mencari jabatan politik atau administrative
- c) Keanggotaan aktif suatu organisasi politik
- d) Keanggotaan pasif suatu organisasi politik
- e) Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik (quasi politikal)

³¹ Kristiadi, J. 1996. Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih di Indonesia. Prisma 3.

- f) Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya
- g) Partisipasi dalam diskusi politik informal minat umum dalam politik
- h) *Voting* (pemberian suara)
- i) Apaty total

Menurut Mas'ood dan MacAndrews adalah peran serta atau partisipasi politik masyarakat secara umum dapat kita kategorikan dalam bentuk-bentuk berikut :

- a) *Electrolaral activity*, yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pemilihan. Termasuk dalam kategori ini adalah ikut serta dalam memberikan sumbangan untuk kampanye, menjadi sukarelawan dalam kegiatan kampanye, ikut mengambil bagian dalam kampanye atau rally politik sebuah partai, mengajak seseorang untuk mendukung dan memilih sebuah partai atau calon pemimpin, memberikan suara dalam pemilihan, mengawasi pemberian dan penghitungan suara, menilai calon-calon yang diajukan dan lain-lainnya.
- b) *Lobbying*, yaitu tindakan dari seseorang atau sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah ataupun tokoh politik dengan tujuan untuk mempengaruhinya menyangkut masalah tertentu.
- c) *Organizational activity*, yaitu keterlibatan warga masyarakat ke dalam organisasi sosial dan politik, apakah ia sebagai pemimpin, aktivis, atau sebagai anggota biasa

- d) *Contacting*, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan secara langsung pejabat pemerintah atau tokoh politik, baik dilakukan secara individu maupun kelompok orang yang kecil jumlahnya. Biasanya, dengan bentuk partisipasi seperti ini akan mendatangkan manfaat bagi yang orang yang melakukannya
- e) *Violance*, yaitu dengan cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah, yaitu dengan cara kekerasan, pengacauan dan pengrusakan.³²

2.2.4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Menurut Surbakti faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi yang otonom adalah :

- a) Kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara hal ini menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan dan politik tempat ia hidup. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat tempat dia hidup.
- b) Kepercayaan terhadap pemerintah yaitu penilaian seseorang terhadap pemerintah apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat atau tidak. Apabila pemerintah sebelumnya dianggap tidak dapat mengakomodir

³² Mohtar Mas' oed – Colin MacAndrews, Perbandingan Sistem Politik . Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, 2008

aspirasi masyarakat, maka pada pemilihan politik selanjutnya akan mempengaruhi partisipasi politik masyarakat

Adapun tahapan penyelenggaraan pemilu yaitu :

- a) Tahapan Persiapan
- b) Tahapan Pelaksanaan
- c) Tahapan Penyelesaian³³

2.2.5. Partai Politik dan Pemilu

Partai politik adalah organisasi yang beroperasi dalam sistem politik. Partai politik memiliki sejarah panjang dalam hal promosi ide-ide politik dari level masyarakat ke level negara. Namun, sebelum dilakukan pembicaraan lebih lanjut, perlu kiranya diberikan definisi mengenai partai politik yang digunakan dalam tulisan ini. Sebuah definisi klasik mengenai partai politik diajukan oleh Edmund Burke tahun 1839 dalam tulisannya "*Thoughts on the cause of the present discontents*". Burke menyatakan bahwa "*party is a body of men united, for promoting by their joint endeavors the national interest, upon some particular principle upon which they are all agreed*" [partai politik adalah lembaga yang terdiri atas orang-orang yang bersatu, untuk mempromosikan kepentingan nasional secara bersama-sama, berdasarkan pada prinsip-prinsip dan hal-hal yang mereka setujui]. Definisi Burke ini tampak masih "abstrak" oleh sebab tidak semua partai secara empiris memperjuangkan kepentingan

³³ A. Ramlan Surbakti, dkk, 2008, Sistem Pemilu dan Tatanan Politik Demokrasi, Kemitraan, Jakarta

nasional. Ini tampak misalnya dalam tulisan Robert Michels tentang *The Iron Law of Oligarchy* (Hukum Besi Oligarki). Robert Michels menyatakan bahwa partai politik, sebagai sebuah entitas politik, sebagai sebuah mekanisme, tidak secara otomatis mengidentifikasi dirinya dengan kepentingan para anggotanya juga kelas sosial yang mereka wakili. Partai sengaja dibentuk sebagai alat untuk mengamankan tujuan. Juga menjadi bagian dari tujuan itu sendiri, memiliki tujuan dan kepentingan di dalam dirinya sendiri. Dalam sebuah partai, kepentingan massa pemilih yang telah membentuk partai kerap kali terlupakan oleh sebab terhalangi oleh kepentingan birokrasi yang dijalankan pemimpin-pemimpinnya.

Sedangkan pemilu dijelaskan dalam Pasal 1 nomor 1 UU No. 15 Tahun 2011 menentukan bahwa, Pemilihan Umum Adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, Umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atau, secara ringkas dikemukakan oleh Harmaily Ibrahim bahwa, pemilu Merupakan suatu cara untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk di badan Perwakilan rakyat . Dengan demikian, pemilu pada hakikatnya merupakan wahana Untuk berkompetisi secara sehat, partisipatif, dinamis dan bertanggung jawab bagi Partai Politik (Parpol) dalam menyalurkan kehendak rakyat, masyarakat dan bangsa Guna mewujudkan tujuan bernegara.³⁴

³⁴ Pasal 1 nomor 1 UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum

2.2.6. Partisipasi Politik Ditinjau Dari Perspektif Teori Pertukaran George

Homans

Teori pertukaran sosial dilandaskan pada prinsip transaksi ekonomis yang elementer, orang menyediakan barang atau jasa yang diinginkan. Ahli teori pertukaran ini memiliki asumsi sederhana bahwa interaksi sosial itu mirip dengan transaksi ekonomi, akan tetapi mereka mengakui bahwa pertukaran sosial tidak selalu dapat diukur dengan nilai uang, sebab dalam berbagai transaksi sosial dipertukarkan juga hal-hal yang nyata dan tidak nyata.³⁵

Homans tertumpu pada asumsi bahwa orang terlibat dalam perilaku untuk memperoleh ganjaran dan menghindari hukuman. Proses pertukaran dapat dijelaskan lewat lima pernyataan proposional yang saling berhubungan dan berasal dari psikologi ini sebagai berikut :

- a) Proposisi sukses: Dalam tindakan, semakin sering suatu tindakan tertentu memperoleh ganjaran, semakin banyak tindakannya semakin banyak pula ganjarannya. Dalam proposisi ini menurut Homans, bahwa bilamana seseorang berhasil memperoleh ganjaran (menghindari hukuman) maka akan cenderung untuk mengulangi tindakan tersebut.

Hal yang ditetapkan Homans mengenai proposisi sukses :

³⁵ Syahri, M. 2014. Teori pertukaran sosial goerge c. Homans dan peter m. Blau. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik

1. Semakin sering hadiah diterima menyebabkan semakin sering tindakan dilakukan, akan tetapi hal ini tidak dapat berlangsung tanpa batas.
2. Semakin pendek jarak waktu antara perilaku dan hadiah, maka semakin besar kemungkinan orang mengulangi perilaku. Pemberian hadiah secara intermitten lebih besar kemungkinannya menimbulkan perulangan perilaku ketimbang menimbulkan hadiah yang teratur.
 - b) Proposisi pendorong: Bila dalam kejadian di masa lalu dorongan tertentu atau sekumpulan dorongan telah menyebabkan tindakan orang diberi hadiah, maka semakin serupa dorongan kini dengan dorongan di masa lalu, dan dengan demikian semakin besar kemungkinan orang melakukan tindakan serupa.
 - c) Proposisi nilai: Semakin tinggi nilai suatu tindakan, maka semakin senang seseorang melakukan tindakan itu. Proposisi ini khusus berhubungan dengan ganjaran atau hukuman yang merupakan hasil suatu tindakan.
 - d) Proposisi deprivasi-satiasi: Semakin besar keuntungan yang diterima seseorang sebagai hasil tindakannya, maka semakin besar kemungkinan ia melaksanakan tindakan itu.
 - e) Proposisi persetujuan-agresi: Bila tindakan seseorang tidak memiliki sebuah ganjaran yang diharapkannya, atau menerima hukuman yang

tidak diharapkan, maka dia akan marah, dia menjadi sangat cenderung melakukan perilaku agresif, dan hasil perilaku lebih bernilai baginya.

- f) Proposisi rasionalitas: Dalam memilih di antara berbagai tindakan alternatif, seseorang akan memilih satu diantaranya, yang dia anggap saat itu memiliki value (V), sebagai hasil, dikalikan dengan probabilitas (P), untuk mendapatkan hasil yang lebih besar.³⁶



³⁶ Syahri, M. 2014. Teori pertukaran sosial goerge c. Homans dan peter m. Blau. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, mengingat tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari partisipasi masyarakat serta faktor-faktor penghambatnya dalam pembangunan politik di daerah Kab. Aceh Besar. Menurut Maleong metode kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami dan menganalisis permasalahan yang terjadi di masyarakat. Metode ini membangun gambaran secara kompleks, menganalisis dan melaporkan pandangan informan secara terperinci dan alamiah. Oleh karena itu, informan diharapkan memiliki wawasan yang cukup terkait dengan permasalahan yang diteliti sehingga menghasilkan jawaban yang berbobot dan spesifik.³⁷

Hakekat dari peneliti adalah mengamati informan yang biasanya aktif di lingkungan masyarakat, berusaha memahami permasalahan yang terjadi, dan berpikiran terbuka. Interpretasi dari informan merupakan interpretasi yang bermakna dan sesuai dengan kenyataan. Interpretasi yang dikemukakan juga akan beragam, tergantung dengan pengalaman informan tersebut baik melalui historis atau *cultural*. Pernyataan yang didapat dari informan akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

³⁷ Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif & RND*. Alfabeta. Bandung

tertulis atau secara lisan, yang kemudian dikumpulkan oleh peneliti bersifat penemuan.³⁸

3.2 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono objek penelitian adalah suatu atribut, sifat, atau nilai dari kegiatan seseorang yang mempunyai variasi tertentu sesuai dengan keinginan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sasaran dari objek yang diteliti akan menjelaskan siapa, dimana, dan kapan penelitian dilakukan, serta dapat menambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu.³⁹ Pada penelitian ini objek yang akan diteliti adalah informan dari pemuda masyarakat, kaum perempuan, dan pemuka masyarakat.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilakukannya proses studi yang digunakan untuk memperoleh data penelitian secara langsung. Lokasi penelitian ditentukan berdasarkan lokasi yang mudah dijangkau, tidak begitu asing dengan peneliti, dan bersedia menerima peneliti untuk mengadakan penelitian.⁴⁰ Dengan begitu, lokasi penelitian dilakukan didaerah sekitar tempat tinggal peneliti, yaitu Desa Garot, Gue Gajah, Lam Bheu, Ajun, dan Lampeuneurut.

³⁸ Ayub, A., Razzaq, A., Aslam, M.S., & Iftekhar, H. 2013. *A Conceptual framework on evaluating SWOT analysis as the mediator in strategic marketing planning through marketing intelligence*. European Journal of Business and Social Sciences.

³⁹ Umi, Narimawati., Sri Dewi, Anggadini., Linna, Ismawati. 2011. *Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Pertama, Genesis*. Pondok Gede, Bekasi.

⁴⁰ Darmadi, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data merupakan suatu teknik atau metode mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua data secara objektif yang kemudian akan diteliti. Teknik pengumpulan data memerlukan langkah yang tepat, sistematis, dan strategis agar bisa mendapatkan data yang valid dan akurat sesuai dengan kenyataan di lapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti antara lain :

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik informasi yang diterima.⁴¹ Wawancara dilakukan sesuai pedoman yang telah disesuaikan dengan peneliti berdasarkan pertanyaan yang sebelumnya telah dirangkum.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dan kepustakaan dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder, dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk mengkaji, menafsirkan untuk sebagai pelengkap data primer dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal, dokumen, peraturan perundangundangan, artikel-artikel, tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan

⁴¹ Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung : IKAPI

dengan masalah yang diteliti.⁴² atau informasi lainnya dari internet yang berkaitan dengan kajian penelitian ini sebagai penunjang penelitian yang akan diteliti.

3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian di dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang di tempuh peneliti agar data atau informasi dapat diperolehnya, karena itu yang paling penting bagaimana peneliti menentukan informan dan mendapatkan informan. Peneliti menggunakan *purposive sampling* dalam penelitian ini, yang mana prosedur ini adalah suatu strategi menentukan informan yang paling umum di dalam penelitian kualitatif, dengan menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu.

Penelitian menggunakan metode *purposive sampling* untuk memperoleh subjek penelitian. Dalam tehnik *purposive sampling* peneliti memilih sendiri yang akan diteliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki sample itu. Teknik ini didasarkan pada tujuan tertentu dengan tetap mempertahankan karakteristik subjek penelitian

Berdasarkan prosedur proposional tersebut maka tabel informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁴² Rukajat, Ajat.2018. *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*.

No	Informan	Jumlah
1	KIP Aceh Besar	1
2	Masyarakat Desa Gue Gajah dan Desa Garot	4
3	Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih KIP Aceh Besar	1
	Jumlah	6

3.6 Sumber Data

Sumber data ialah dari mana asal dari subyek atau informasi data tersebut diperoleh.⁴³ Pada penelitian ini terdapat dua jenis sumber data yang akan digunakan, yaitu sebagai berikut :

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh berdasarkan hasil dari wawancara oleh para responden. Hasil tersebut terkait dengan informasi yang ingin didapatkan di lapangan, yang kemudian akan dicatat dan dikumpulkan sebagai bagian dari sumber data penelitian.
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh berdasarkan pengamatan maupun informasi-informasi dari fakta lapangan yang bersumber pada artikel-artikel maupun buku tertulis yang biasanya berbentuk angka. Data tersebut akan dikumpulkan sesuai dengan penelitian yang akan diteliti.

⁴³ Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Kabupaten Aceh Besar

4.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Aceh Besar adalah salah satu Kabupaten di Aceh, Indonesia. Ibu kotanya adalah Jantho, yang resmi di pindahkan aktifitas perkantoran dari Banda Aceh pada tanggal 29 Agustus 1983, dan peresmianya dilakukan oleh Bapak Menteri Dalam Negara Republik Indonesia pada masa itu, yaitu Bapak Soepardjo Rustam pada tanggal 3 Mei 1984. Secara Geografis Kabupaten Aceh Besar terletak antara 50° 2' - 50° 8' Lintang Utara dan 95° 0' - 95° 8' Bujur Timur. Batas Wilayah didelineasi berdasarkan batas-batas dari Kabupaten Aceh Besar adalah.

- Sebelah Utara: Selat Malaka
- Sebelah Selatan: Kabupaten Aceh Jaya
- Sebelah Barat: Kabupaten Pidie
- Sebelah Timur: Samudera Indonesia

Secara geografis sebagian besar wilayah Kabupaten Aceh Besar berada pada hulu aliran sungai Krueng Aceh. Saat ini kondisi tutupan lahan adalah 62,5% (menurut data citra landsat tahun 2007). Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda yang merupakan bandara internasional dan menjadi salah satu pintu gerbang untuk masuk ke Provinsi Aceh berada di wilayah Kabupaten ini. Pulau Benggala yang merupakan pulau paling barat dalam wilayah Republik Indonesia merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Besar.

Dengan luas wilayah 2,969,00 Km² mencakup 23 Kecamatan dan 604 Gampong. Pada waktu Aceh masih sebagai sebuah kerajaan, yang dimaksud dengan Aceh atau Kerajaan Aceh adalah wilayah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar ditambah dengan beberapa kenegrian/daerah yang telah menjadi bagian dari Kabupaten Pidie. Selain itu, juga termasuk Pulau Weh (sekarang telah menjadi pemerintah kota Sabang), sebagai wilayah pemerintah kota Banda Aceh, dan beberapa kenegrian/daerah dari wilayah Kabupaten Aceh Besar. Pada tahun 2010, jumlah penduduk di wilayah ini adalah 350.255 (dari penduduk seluruh provinsi Aceh yang berjumlah 4.486.570) yang terdiri atas 179.495 pria dan 170.730 wanita (rasio 105,13). Dengan luas daerah 2.969 km² (dibandingkan luas seluruh provinsi Aceh 57,956 km²), tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini adalah 118 jiwa/km²). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 384.661 jiwa dengan luas wilayahnya 2.969,00 km² dan ebaran penduduk 129 jiwa/km² . Salah satu kecamatannya berupa kepulauan yaitu kecamatan Pulo Aceh.⁴⁴

4.1.3 Visi dan misi Kabupaten Aceh Besar

Visi : Terwujudnya Aceh Besar Yang maju, sejahtera dan bermartabat dalam syariah islam Misi:

1. Meningkatkan Pelaksanaan Syariah Islam
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dibidang Pendidikan, Bidan Kesehatan dan Bidang Pemberdayaan Komunitas

⁴⁴ Acehbesarkab.go.id diakses tanggal 23 April 2024

4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean governance*)
5. Meningkatkan kualitas dan Kuantitas Infrastruktur disegala bidang
6. Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang berbasis Mukim dan Gampong.
7. Meningkatkan Percepatan Laju Pembangunan Masyarakat Pesisir, Terisolir dan Tertinggal.⁴⁵

4.2 Gambaran Umum Komisi Independen Pemilihan Aceh Besar

4.2.1 Sejarah Komisi Independen Pemilihan Aceh Besar

Komisi Independen Pemilihan Aceh Besar adalah sebuah instansi yang menyelenggarakan pemilu di Aceh Besar, Lokasi Komisi Independen Pemilihan Aceh Besar di Jantho Makmur, Kec. Kota Jantho, Kabupaten Aceh besar. Komisi Independen Pemilihan merupakan sebuah instansi yang mengelola dan melaksanakan tahapan pemilu hingga pemungutan suara, mulai dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan anggota DPRRI, DPRK dan DPRD, serta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA). Komisi Independen Pemilihan hanya berada di Provinsi Aceh, dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan daerah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.

⁴⁵ Acehbesarkab.go.id diakses tanggal 23 April 2024

Teknis pelaksanaan lainnya diatur dalam Qanun dan peraturan KPU atau singkatan dari Komisi Pemilihan Umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan pemilihan Umum (Pemilu) di Aceh, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh beserta Komisi Independen pemilihan (KIP) Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Di Provinsi Aceh, Komisi Independen Pemilihan dibentuk pada tahun 2003 dan berhasil melaksanakan Pemilu sebanyak 5 kali, yaitu Pemilu tahun 2004, Pilkada 2006, Pemilu 2009, Pilukada 2011, Pemilu 2014 dan Pemilu 2019.

4.2.2 Visi dan Misi Komisi Independen Pemilihan Aceh Besar

Visi Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, Professional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi

- Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum
- Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif.
- Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.⁴⁶

4.2.3 Tugas, dan Wewenang Komisi Independen Pemilihan Aceh Besar

Pembentukan Komisi Independen Pemilihan dan Penetapan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Umum Komisi Independen Pemilihan, dijelaskan bahwa unruk melaksanakan Pemilihan Umum, KIP mempunyai tugas wewenang sebagai berikut:

- Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum
- Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum.
- Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS.
- Menetapkan Jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II.

⁴⁶ *Ibid*

- Mengumpulkan dan mensistемasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum.
- Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf: Tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KIP sebagai maksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KIP mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.⁴⁷

4.3. Proses Sosialisasi Pemilu 2019 Di Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan data pemilu Presiden tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu memicu tinggi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Presiden tahun 2019 di Aceh Besar. Pemikiran yang dibangun di tengah-tengah masyarakat merupakan pemikiran yang kebanyakan mengandung tentang sisi positif calon paslon tersebut, dan hal itu telah menjadi budaya sehingga anggapan masyarakat untuk memilih Presiden merupakan hal yang wajib. Disamping itu, perbedaan antara pemilihan presiden tahun 2014 dan 2019 salah satunya juga termasuk kesiapan KIP Aceh Besar. dalam menyelenggarakan pemilihan Presiden 2019, mulai dari memberikan sosialisasi maupun hingga

⁴⁷ Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

penetapan DPT. Pada kenyataannya, KIP telah membuat beberapa program terkait persoalan DPT dan memberikan himbauan kepada sebahagian masyarakat yang tidak dapat undangan bisa menggunakan KTP jika ingin memilih, peneliti merasakan program tersebut menjamah masyarakat secara keseluruhan, KIP Aceh Besar melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh masyarakat yang masuk kedalam kategori pemilih sebelum pelaksanaan pemilihan.⁴⁸

Di kalangan masyarakat Aceh Besar yang tidak mengikuti pemilihan Presiden tahun 2014 dan berbeda pada tahun 2019, di karenakan mereka tidak mendapatkan apa-apa setelah memberikan hak pilihnya, maka dari itu pemikiran tentang politik uang sudah menjadi sarana utama dalam pelaksanaan pemilihan Presiden. Dengan demikian masyarakat juga merasakan sudah banyak janji yang tidak jelas terhadap kehidupan mereka, pada saat pelaksanaan pemilu baik pemilihan Eksekutif maupun Legislatif banyak calon yang memanfaatkan moment untuk saling mengumbar janji yang pada akhirnya janji tetaplah janji tanpa adanya realisasi. Maka dari itu timbullah rasa jenuh didalam benak masyarakat yang begitu kuat sehingga siapapun yang mencalonkan diri seolah-olah hanyalah sekelompok penipu bersampul penyatu.

Menurut Ketua KIP Aceh Besar, mengatakan bahwa banyaknya angka golput pada pemilihan presiden tahun 2014 disinyalir karena kurangnya kesadaran politik masyarakat terhadap pentingnya memilih pemimpin, masyarakat terkadang menganggap pemilu ini tidak terlalu penting, banyak yang masih menganggap pemilu ini tidak mempunyai efek langsung terhadap dirinya maupun terhadap masyarakat

⁴⁸ Sumber data dari Komisi Independen Pemilihan (KIP)

lainnya, juga masyarakat berpikir bahwa pemilu ini hanyalah kepentingan elite politik saja yang lebih mengutamakan kepentingan individu dan kelompok dibandingkan kepentingan rakyat sehingga kepercayaan masyarakat berkurang terhadap partai politik dan calon Presiden dan wakil Presiden.

Banyaknya angka golput pada pemilihan presiden tahun 2014 disinyalir karena kurangnya kesadaran politik masyarakat terhadap pentingnya memilih pemimpin, masyarakat terkadang menganggap pemilu ini tidak terlalu penting.⁴⁹

Sedangkan menurut Ketua Divisi Sosialisasi, beliau secara pribadi menyebutkan bahwa:

Suara yang diperoleh dari partai politik mengalami peningkatan di pemilihan Presiden tahun 2019 di Aceh Besar dari pada pemilihan Presiden yang sebelumnya. hal itu terjadi karena adanya peran ulama yang menghimbau secara nasional maupun di Aceh secara besar-besaran untuk mendukung pasangan paslon tertentu. Terlebih lagi di Aceh sangat patuh dengan ulama ditambah juga kekuatan dukungan dari partai lokal. Dan juga adanya intruksi dari Habbib Rizziq sebagai pimpinan Forum Pembela Islam (FPI) yang sangat dideng ar bukan hanya oleh anggota FPI saja bahkan oleh masyarakat banyak. Dalam ilmu politik hal ini disebut sebagai ulama effect.⁵⁰

⁴⁹ Wawancara dengan Ketua KIP Aceh Besar pada tanggal 10 Juni 2024

⁵⁰ Wawancara dengan Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih KIP Aceh Besar. Pada tanggal 11 Juni 2024

Oleh karena itu dengan melihat kinerja KIP Aceh Besar pada saat pemilihan Presiden tahun 2019 dilakukanlah evaluasi oleh KIP Aceh Besar lebih meningkat kinerja dalam menyelenggarakan pemilihan Presiden tahun 2019 diantaranya, KIP Aceh Besar gencar melakukan sosialisasi di semua kalangan masyarakat juga sinergitas yang dibangun antara penyelenggara pemilu dengan stakeholder, ditambah lagi kampanye yang cukup intens dilakukan oleh masing-masing tim suksesnya. Pada pemilu 2019 terlihat Panwaslih atau Bawaslu Aceh Besar cukup giat dan aktif juga mengajak masyarakat agar tidak golput (golongan putih) karena golput adalah kerugian besar untuk masa depan bangsa lima tahun mendatang. Barangkali karena keseriusan penyelenggara baik dari KIP Aceh Besar maupun Bawaslu Bawaslu kota Aceh Besar dalam mengajak masyarakat untuk tidak golput.

Pada kenyataannya, masih ada masyarakat yang tidak terdaftar didalam DPT yang sangat disayangkan. Walaupun KIP telah membuat beberapa program terkait persoalan DPT dan memberikan himbuan kepada sebahagian masyarakat yang tidak dapat undangan bisa menggunakan KTP jika ingin memilih, akan tetapi dari hasil temuan lapangan peneliti merasakan program tersebut tidak menjamah masyarakat secara keseluruhan, seharusnya KIP Aceh Besar melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh masyarakat yang masuk kedalam kategori pemilih sebelum pelaksanaan pemilihan. Karena dalam temuan dilapangan lebih kurang 10% masyarakat Aceh Besar tidak memilih karena tidak diundang untuk memilih.

Partisipasi masyarakat Aceh Besar juga mengalami fruktatif dari setiap pemilunya. Penyebabnya beragam, mulai dari faktor keamanan, politik uang,

sosialisasi yang dilakukan, pemahaman masyarakat terkait dengan pemilu sehingga mempengaruhi masyarakat untuk bersikap apatis atau tidak pada pemilu. Partisipasi masyarakat yang dapat dilihat peningkatan drastisnya pada pemilu serentak 2019 indikatornya dilihat dari segi pemahaman masyarakat dengan pemilu termasuk menggunakan hak pilih dan gencarnya pemilu yang dilakukan dengan berbagai elemen masyarakat oleh KIP Aceh Besar tujuannya adalah agar masyarakat menggunakan hak pilihnya, karena hak pilih merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara dan hak tersebut telah dijamin oleh negara.

Dapat diketahui juga Dalam hal mewujudkan suatu pemilihan umum yang demokratis pada suatu negara, harus memperhatikan lima hal penting, yang harus ada pada negara demokrasi, diantaranya adalah: a) organisasi penyelenggara yang independen, b) sistem pemilu yang digunakan, c) partisipasi pemilih, d) peserta pemilu, serta e) perangkat hukum yang mengatur. Kelima unsur tersebut yang harus diperhatikan pada suatu negara untuk menyelenggarakan pemilu. Agar pemilu yang demokratis dapat dilakukan dengan baik sehingga hasilnya adalah pemilu yang berkualitas tentunya dapat membawa perubahan yang baik kepada partisipasi masyarakat serta para pemimpin bangsa. KPU dibentuk pada tahun 1999 yang memiliki tugas sebagai penyelenggara pemilu termasuk segala tahapan pelaksanaan pemilu yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan. KPU sendiri bersifat nasional, tetap serta mandiri dalam melaksanakan pesta demokrasi (pemilu) yang ada di Indonesia. Sedangkan pada provinsi Aceh KPU disebut sebagai KIP

Aceh yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang tentang Pemerintahan Aceh.⁵¹

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Besar menggelar Sosialisasi Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar dalam Pemilu Tahun 2019 dan Sosialisasi Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRK. Kegiatan yang diselenggarakan di Orion Hall, Darul Imarah tersebut dihadiri oleh Asisten I Sekdakab Aceh Besar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar, Polres Aceh Besar, Polresta Banda Aceh, Dandim 0101 KBA, Kemenag Aceh Besar, Kesbangpol Aceh Besar, Panwaslih Aceh Besar, serta Partai Politik dan Camat se-Kabupaten Aceh Besar. Hal diungkapkan oleh salah satu anggota KIP Aceh Besar dalam wawancaranya:

Kami mengharapkan kepada stakeholder untuk menyampaikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai dapil dan alokasi kursi yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2023 bagi Kabupaten Aceh Besar pada pemilu tahun 2024.⁵²

Hal yang sama juga diungkapkan Anggota KIP Aceh Besar yang membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan mensosialisasikan PKPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

⁵¹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengamanan Surat Suara Di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum”.

⁵² Wawancara dengan anggota KIP Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 22 Januari 2024 di Aceh Besar

Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Untuk Pemilu Tahun 2019 lalu, berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2018 telah ditetapkan jumlah alokasi kursi DPRK Kabupaten Aceh Besar berjumlah 35 kursi dan 5 jumlah dapil.⁵³

Sosialisasi penetapan dapil dan alokasi kursi, anggota KIP Aceh Besar yang membidangi Divisi Teknis Penyelenggaraan, mensosialisasikan dengan 2 cara yaitu sosialisasi secara formal dan secara informal.

a) Sosialisai Formal

Berdasarkan hasil observasi, menunjukkan bahwa selama ini yang tempuh Komisi Independent Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Besar yaitu bermitra sosialisasi dalam bentuk formal. Semua lembaga atau instansi yang terkait langsung dengan pemilihan umum, misalnya seluruh partai politik, dimana Komisi Independent Pemilihan (KIP) Aceh Besar menyampaikan seluruh produk hukum terkait pemilu.

Hasil wawancara dengan anggota KIP divisi sosialisasi pilih, partisipasi masyarakat dan sumberdaya manusia bahwa :

Instansi pemerintah yang terkit langsung dengan pemilihan umum yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (PMG) yang kami hadirkan

⁵³ Wawancara dengan anggota KIP Kabupeten Aceh Besar pada tanggal 22 Januari 2024 di Aceh Besar

semua sebagai mitra untuk menyampaikan semua produk-produk hukum dan bagaimana proses-proses pelaksanaan pemilu itu secara formal, kemudian lain lagi terhadap pemerintah daerah sendiri, dari kecamatan, kepala desa dan sebagainya itu ada pertemuan tertentu, sosialisasi setiap produk-produk Komisi Independent Pemilihan baik kami secara langsung melakukan maupun penyelenggara kami di tingkat kecamatan dan desa, itu yang secara formal.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa Partai politik, Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (PMG) merupakan bagian kerjasama Komisi Independent Pemilihan, bukan sekedar menyampaikan produk hukum dan sosialisasi, tapi mereka juga membantu dalam menyampaikan persoalan kepemiluan, termasuk Dinas Komunikasi dan Informasi, selebihnya untuk menjadi sasaran itu seperti sekolah-sekolah yakni organisasi-organisasi pemuda, kampus yang sifatnya sasaran sosialisasi dan tidak menjadi bagian dari lembaga mitra untuk melanjutkan sosialisasi.

Adapun data pendukung dalam penelitian ini terkait dengan sosialisasi formal yaitu proses sudah diatur dalam Undang-Undang, bahwa lembaga-lembaga tersebut mempunyai kewajiban yakni pemerintah daerah, Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Kependudukan dan

⁵⁴ Wawancara dengan anggota KIP Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 22 Januari 2024 di Aceh Besar

Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (PMG) dan sebagainya. Sebagaimana di pertegas oleh anggota divisi sosialisasi pemilih, partisipasi masyarakat dan sumberdaya manusia yang megatakan bahwa:

Itu memang sudah diatur dalam undangundang pemilu bahwa mereka punya kewajiban langsung untuk memfasilitasi Komisi Independent Pemilihan, kadang juga daerah tertentu, termasuk di Aceh Besar, tindak lanjutnya itu dalam bentuk Memorandum Of Understanding(MoU), tapi MoU selama ini yang pernah kami lakukan itu, langsung dari pak Bupati yang menginstruksikan langsung kepada instansi terkait.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (PMG) mempunyai kewajiban langsung untuk memfasilitasi Komisi Pemilihan Umum. Lebih lanjut disampaikan juga bahwa:

Kami bekerjasama dengan beberapa pihak, termasuk di dalamnya instansi pemerintah, seperti Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), bekerjasama dengan pemerintah desa, organisasi-organisasi kampus maupun organisasi kepemudaan di luar lingkup kampus serta kerja sama dengan media Online.⁵⁶

⁵⁵ Wawancara dengan anggota KIP Kabupeten Aceh Besar pada tanggal 22 Januari 2024 di Aceh Besar

⁵⁶ Wawancara dengan anggota KIP Kabupeten Aceh Besar pada tanggal 22 Januari 2024 di Aceh Besar

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Komisi Insepndent Pemilihan melakukan kerjasama dengan beberapa pihak yakni Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), pemerintah desa, organisasi-organisasi kampus maupun organisasi kepemudaan di luar lingkup kampus serta kerja sama dengan media Online seperti media cetak, radio, Televisi dan sebagainya.

b) Sosialisasi Informal

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa belum ada produk hukum tertentu yang mengatur metode sosialisasi dengan model informal, hanya disebutkan bahwa Komisi Independent pemilihan bisa melakukan sosialisasi dengan teman, komunitas-komunitas dan sebagainya, tapi untuk persoalan metoden atau cara-cara tertentu itu tidak diatur secara hukum, jadi Komisi Independent Pemilihan yang harus membuat kreatifitas sendiri untuk bagaimana memaksimalkan kegiatan sosialisasi.

Hasil wawancara dengan bapak anggota KIP divisi sosialisasi pemilih, partisipasi masyarakat dan sumberdaya manusia bahwa:

Kalau yang informalnya, selain dalam bentuk berbasis keluarga informasinya, kami juga menempuh cara-cara yang rutin dilakukan oleh negara seperti ketemu dengan komunitas-komunitas, baik teman-teman dari tingkat kecamatan, desa maupun relasi. Mencari misalnya komunitas motor, mereka minta teman-temannya untuk

mengumpulkan, kemudian mereka datang disitu memberikan informasi mengenai pemilu yang mereka pahami langsung bahwa ini yang mereka butuhkan untuk mengikuti pemilu. Di desa-desa seperti di pesantren. Ini juga kami tempuh, kami utus teman-teman relawan demokrasi yang baciknya keagamaan untuk masuk ke pesantren untuk sosialisasi. Sosialisasi juga dilakukan di hari-hari pasar di kecamatan, mereka turun, ada yang bawa megaphone, ada yang bawa selebaran, nah itu semua model sosialisasi informal karena tidak dilegalkan dalam bentuk lembaga ke lembaga untuk melakukan itu.”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Komisi Independent Pemilihan (KIP) menempuh cara-cara yang rutin seperti ketemu dengan komunitas-komunitas, baik teman-teman dari tingkat kecamatan, desa maupun relasi. Sebenarnya informal, karena mereka secara pribadi datang dan tidak dengan surat resmi dari Komisi Independent Pemilihan (KIP), semua model sosialisasi informal karena tidak dilegalkan dalam bentuk lembaga ke lembaga untuk melakukan itu.

Adapun data pendukung mengenai sosialisasi informal yaitu pihak dari Komisi Independent Pemilihan (KIP) melihat situasi dan memanfaatkan waktu untuk bagaimana membangun sebuah komunikasi atau mengangkat sebuah cerita yang di dalamnya bisa masuk pesan-pesan sosialisasi pemilu. Seperti yang kita ketahui, menjelang pemilu, trennya semua masyarakat akan

⁵⁷ Wawancara dengan anggota KIP Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 22 Januari 2024 di Aceh Besar

berbicara persoalan pemilu, kemudian memperhatikan untuk bagaimana masuk dan membahas persoalan pesan-pesan sosialisasi.

Hasil wawancara anggota divisi perencanaan data dan informasi mengatakan bahwa :

Dalam melakukan sosialisasi ada yang dinamakan sosialisasi berbasis keluarga, sosialisasi informal juga biasa kami lakukan dengan keliling ke kampung-kampung atau ke pasar-pasar, menyebar brosur, berbincang dengan masyarakat.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Independent Pemilihan yaitu mulai dari keluarga terdekat. Seperti dalam satu rumah, ada orang tua, anak dan sosialisasi biasanya dilakukan dengan keliling ke kampung-kampung atau ke pasar-pasar, menyebar brosur, berbincang dengan masyarakat sebagainya. Proses sosialisasi ini juga biasanya dilakukan oleh KPPS saat menyebar undangan secara door to door, misalnya mengajak masyarakat untuk memilih di TPS.

4.5. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tingkat Partipasi Pemilu Di Aceh Besar

Dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat di Aceh Besar tentu ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat tersebut diantaranya yaitu:

⁵⁸ Wawancara dengan anggota KIP Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 22 Januari 2024 di Aceh Besar

1. Kesiapan Komisi Independen Pemilihan (KIP)

Kesuksesan pemilu Presiden pada tahun 2019 di Aceh Besar salah satunya disebabkan oleh kesiapan KIP di Aceh Besar dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilu pada saat itu. KIP di Aceh Besar selaku penyelenggara pemilu telah melakukan segala upaya untuk menyukseskan pemilihan Presiden tahun 2019, mulai dari memberikan sosialisasi, mengadakan seminar pentingnya memilih dalam pemilu kepada pemilih yang ada di Aceh Besar, hingga menyiapkan kepastian daftar pemilih tetap (DPT) di kota Banda Aceh. Ketua KIP Aceh Besar mengatakan, pada pemilu Presiden 2019 pihak penyelenggara pemilu itu melakukan sosialisasi secara massif, KIP di Aceh Besar gencar mensosialisasikan pemahaman tentang pemilu terhadap lapisan masyarakat agar masyarakat peka terhadap perpolitikan di negara ini, juga KIP di Aceh Besar melakukan sosialisasi sampai ketinggian nelayan, pemulung, bahkan di tempat keramaian seperti di pasar Jantho dan Pasar Lambaro Cafe dengan bersosialisasi secara personal atau *face by face* untuk mencapai target nasional dalam pemilu 2019 yang lalu.⁵⁹

Selain itu hasil wawancara dengan KIP Aceh Besar yang menyatakan bahwa “Sosialisasi yang dilakukan KIP Aceh Besar dilakukan bersama relawan demokrasi, LSM serta lintas organisasi KIP mengajak kelompok tersebut untuk mengencarkan sosialisasi, karena pada Pemilu 2019 segmen masyarakat semakin bertambah yaitu hampir mencapai 11 segmen sedangkan pada pemilu sebelumnya yaitu pemilu 2014 hanya 4 segmen masyarakat. Semakin bertambahnya segmen maka semakin besar

⁵⁹ Wawancara dengan Ketua KIP Aceh Besar pada tanggal 10 Juni 2024

juga tanggungjawab KIP untuk mengecarkan sosialisasi, oleh karena itu agar setiap segmen tersentuh maka yang harus dilakukan KIP adalah mengajak atau berkolaborasi dengan lintas organisasi untuk sama-sama membantu KIP mengecarkan sosialisasi agar sosialisasi dapat tersentuh kesemua lapisan masyarakat Aceh Besar.

Tak hanya itu, Komisi Independen Pemilihan juga melibatkan relawan demokrasi, ada 100 orang relawan demokrasi di Kabupaten Aceh Besar yang bertugas untuk mensosialisasikan tentang pemilu kepada seluruh lapisan masyarakat dengan membuat strategi sosialisasi yang tersebar dalam 11 basis, diantaranya yaitu, Basis keluarga, basis pemilih pemula, basis muda, basis perempuan, basis penyandang disabilitas, basis berkebutuhan khusus, basis marginal, basis komunitas, basis keagamaan, basis komunitas dan demokrasi, yang terakhir 49 basis warganet. Para relawan demokrasi ini setiap harinya melakukan kegiatan sosialisasi secara berjenjang kepada masyarakat.⁶⁰

Selain itu berbagai macam element baik dari pasangan calon, tim pasangan calon Presiden maupun partai politik dan juga tim personal dari para calon Legislatif mereka melakukan kampanye sebagai pendidikan politik terhadap masyarakat yang terutama itu DPRK, mereka turun langsung kelapangan serta ikut berjumpa langsung dengan lapisan masyarakat untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa pemilu merupakan instrument amat penting dalam menentukan

⁶⁰ Wawancara dengan Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih KIP Aceh Besar. Pada tanggal 11 Juni 2024

arah pembangunan bangsa kedepan, sebab dengan memilih calon berkualitas, maka pemimpin yang terpilih bisa diharapkan membawa perubahan kearah yang lebih baik. Termasuk memberikan keyakinan kepada mereka, tidak selamanya benar juga kalau pemilu tidak memberikan dampak pada perubahan hidup mereka. Dan ini sangat membantu tim penyelenggara pemilu dalam melakukan sosialisasi ataupun dalam memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat di Aceh Besar.

Selanjutnya dalam menyelenggarakan Pemilu tahun 2019 di Aceh Besar ada beberapa strategi yang digunakan oleh penyelenggara pemilihan pada saat itu, adapun strateginya yaitu:

1. Menyiapkan dan mendistribusikan masa logistik (surat suara) dengan baik sehingga tersebar keseluruh wilayah.
2. Membuat rumah pintar pemilu, ini semacam perpustakaan atau laboratorium pemilu yang di gerakkan untuk sosialisasi.
3. Menyiapkan kepastian data masyarakat Aceh Besar dalam pemilihan

Dapat dilihat bahwa persiapan KIP Aceh Besar dalam menyukseskan tahapan pemilu 2019 sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, baik ditinjau dari segi logistik, kemudian dalam mensosialisasikan pemahaman tentang pemilu kepada masyarakat pun tidak ada kendala yang begitu serius karena bila dilihat partisipasi politik masyarakat pada saat itu juga semakin meningkat daripada partisipasi sebelumnya. Kemudian pemilihan Presiden di Aceh Besar tahun 2019 tidak ada terjadinya sengketa apapun yang juga merupakan salah satu prestasi yang

membuktikan bahwa KIP cukup siap sebagai penyelenggara Pemilu Presiden tahun 2019.

2. Kesadaran Berpolitik Masyarakat

Kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik adalah hal yang sangat penting bagi berlangsungnya sebuah budaya politik yang demokratis bagi masyarakat. Kepercayaan masyarakat pada partai politik bukan semata-mata hanya untuk mendapatkan dukungan masyarakat saja, tetapi lebih pada hubungan yang harmonis antara partai politik dan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Kesadaran dan kepercayaan tidak hadir begitu saja, akan tetapi terdapat proses-proses yang mendahuluinya juga kesadaran masyarakat dalam berpolitik melibatkan berbagai hal. Baik yang berasal dari internal maupun dari lingkungan eksternal individu Masyarakat.

Dalam Pemilihan Umum Presiden tahun Aceh Besar sosialisasi politik menjadi hal utama untuk mempengaruhi kesadaran politik masyarakat. Sosialisasi politik yang positif memberikan dampak positif untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam memilih. Sosialisasi politik memberikan informasi-informasi dan ide-ide politik kepada masyarakat yang menjadi sumber pengetahuan politik bagi masyarakat. Informasi politik yang diterima oleh masyarakat berasal dari berbagai sumber melalui media massa, keluarga maupun lingkungan sosial yang menjadi dasar masyarakat untuk menentukan pilihannya mana yang layak dan mampu untuk memimpin sebuah negara

untuk 5 tahun kedepan. Baik buruknya persepsi masyarakat terhadap politik tergantung pada informasi yang didapat saat sosialisasi politik berlangsung.

Menurut Bapak Khaidir, salah seorang warga kecamatan di Darul Imarah, menyebutkan bahwa respon serta antusiasme masyarakat Darul Imarah sangat baik dan rata-rata aktif semuanya dalam menyukseskan Pemilu Presiden tahun 2019 kecuali yang lanjut usia, dan hal ini dipengaruhi dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh panitia penyelenggara pemilu, partai politik maupun tim relawan demokrasi secara tepat sasaran sehingga hal-hal yang ingin disampaikan dalam sosialisasi tersebut tersampaikan secara menyeluruh. Dengan demikian kesadaran serta kepekaan masyarakat terhadap pemilu Presiden tahun 2019 semakin meningkat karena energi positif yang diberikan pada saat sosialisasi berlangsung.⁶¹

Adapun menurut ibu Nurmayanti salah seorang warga Kecamatan Baitussalam mengatakan bahwa sebagai warga negara yang baik harus ikut serta dalam menyukseskan Pemilu karena hak politik yang sudah melekat pada warga negara harus digunakan, karena beliau menganggap satu suara itu menentukan nasib bangsa untuk 5 tahun kedepannya. Jadi, sangat disayangkan apabila hak politik tersebut tidak digunakan dengan sebaik-baiknya dalam pesta demokrasi.⁶²

Selanjutnya menurut ibu Nur Atiah salah seorang warga mengatakan bahwa beliau memilih karena ada surat panggilan ke TPS, dan akan sia-sia bila beliau tidak datang ke TPS untuk memilih pada Pemilihan Presiden tersebut, beliau juga tidak

⁶¹ Wawancara dengan Khaidir, warga Kecamatan Darul Imarah pada tanggal 15 Juni 2024

⁶² Wawancara dengan Nurmayanti, warga Kecamatan Darul Imarah pada tanggal 15 Juni 2024

mau membuang surat suara dan tidak ada alasan baginya untuk tidak memilih. Hal ini disebabkan salah satunya ialah karena beliau ingin seorang pemimpin yang layak untuk memimpin suatu daerah yang mampu mendengarkan semua aspirasi masyarakat dan dikarenakan beliau ingin pemimpin yang mau mendengarkan semua aspirasi dan keluh kesah yang dirasakan oleh masyarakat baik dari perekonomian maupun yang lainnya dan mampu melakukan perubahan dan masyarakat merasakan kesejahteraan.⁶³

Selanjutnya menurut Bapak Yusri Razali, partisipasi politik masyarakat meningkat pada pemilihan umum Presiden tahun 2019 isu-isu besar berskala nasional, misalnya kasus 212 yang sudah mulai heboh sejak akhir 2016. Oleh karena itu, masyarakat ini merasa ingin memenangkan pasangan yang mereka anggap terwakilkan visi misinya sehingga tergerak hati mereka untuk datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya, karena di dorong oleh isu-isu nasional sehingga menggerakkan personal masyarakat untuk memilih pasangan calon Presiden yang di anggap terwakilkan aspirasi yang dimiliki oleh Masyarakat.

Kemudian menurut Khairun Nisa salah seorang waga juga mengatakan bahwa beliau memberikan hak suaranya pada pemilihan Presiden tahun 2019 di Aceh Besar karena beliau ingin melihat kinerja dari pemimpin yang baru agar negara kita bisa lebih maju dan makmur dalam segala aspek. Selain itu bahwa pada pemilihan Presiden tahun 2019 di Kota Banda Aceh beliau memilih pasangan calon Presiden

Prabowo Subianto dengan alasan karena kandidat tersebut berada pada naungan TNI serta mempunyai jiwa kepemimpinan yang tegas.

Selain itu Putro Delvianti salah seorang warga mengatakan bahwa kandidat calon Presiden adalah pemimpin yang lahir dari rakyat yang mempunyai sifat jujur, bersih dan merakyat, dan alasan beliau memilih karena calon Presiden tersebut memiliki jiwa yang besar dan rasa peduli yang besar terhadap rakyat.

3. Organisasi Mahasiswa dan Masyarakat (Ormas)

Pergerakan mahasiswa dan organisasi tersebut karena adanya KIP sebagai penyelenggara pemilu yang merangkul mahasiswa untuk berperan aktif ikut melakukan advokasi terhadap masyarakat dengan mendirikan posko peduli pemilu melalui organisasi kampus. Sosialisasi yang mereka lakukan banyak melalui media massa maupun media cetak seperti whatsapp, instagram, facebook, twitter, koran online, dan juga radio.

Faktor lain yang menyebabkan partisipasi masyarakat meningkat juga di pengaruhi dengan adanya komunitas organisasi masyarakat seperti organisasi kepemudaan, organisasi perempuan, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), himpunan mahasiswa islam (HMI), pelajar islam Indonesia (PII) dan juga organisasi-organisasi kepemudaan lain yang sangat aktif dalam menggerakkan masyarakat serta mengajak masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk memilih Presiden pada saat itu, juga menghimbau kepada masyarakat bahwa pemilu itu sangat penting untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Maka oleh karena sosialisasi yang dilakukan Aceh Besar dilakukan dengan inovatif untuk mengajak masyarakat sehingga berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat serta sikap politiknya. Karena sumber pemahaman tentang pemilu salah satunya diperoleh dari sosialisasi yang dilakukan oleh KIP terlepas ada atau tidak ada hal yang menarik yang dilakukan oleh penyelenggara tersebut. Akan tetapi yang menjadi acuan adalah masyarakat hadir karena dorongan dari diri sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Terlebih pada Pemilu 2019 merupakan pemilihan serentak, yang jumlah kandidat politik tidak sedikit, jadi jika tidak hadir pada saat sosialisasi, di khawatirkan masyarakat akan bingung menentukan pilihan politik.

4. Upgrade Data pemilih

Pengupgradetan data menjadi salah satu faktor penting dalam mendata kembali pemilih secara menyeluruh. Dengan melakukan upgrade data maka setiap meilih akan terdata dan akan meningkatkan partisipasi pemilih. Oleh Karena itu anggota penyelenggara pemilu memilih metode ini untuk terus dilakukan secara menyeluruh hal ini disampaikan dalam wawancaranya:

Sebelumnya belum meningkat, pada tahun 2014 itu masih banyak golput karena mungkin masyarakat kurang mendapatkan informasi tentang pentingnya pemilu. Padahal suara yang terbuang itu sangat merugikan banyak pihak, terutama masyarakatnya sendiri yang rugi karena tidak ikut memilih anggota yang nantinya akan jadi wakil kita di parlemen. Dulu sosialisasinya hanya tingkat kabupaten saja sekarang sudah lebih luas dan sekarang sudah mencapai daerah plosok-plosok. Sebelumnya bahkan perekrutan anggota PPS saja masih banyak belum tau, barulah kemudian sosialisasi gencar dilakukan

upgrade data pada tahun 2019 dan terbukti meningkat itu partisipasi masyarakat di pemilu 2019.⁶⁴

Lebih lanjut lagi juga disampaikan bahwa selain melakukan upgrade data pemilih juga dilakukan sosialisasi secara menyeluruh seperti memasang spanduk yang berisi ajakan untuk memilih dan tujuan pemilu, poster yang di temple di setiap jalan dan gencar mempromosikan di sosmed ini juga efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal ini diungkapkan dalam wawancaranya:

selain melakukan upgrade data pemilih juga dilakukan sosialisasi secara menyeluruh seperti memasang spanduk yang berisi ajakan untuk memilih dan tujuan pemilu, poster yang di temple di setiap jalan dan gencar mempromosikan di sosmed seperti sosmed instagram dan tiktok itu gencar banget promosinya dan ini juga efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat rupanya. Jadi beritanya tersiar ke setiap masyarakat sekarang siapa yang ga pake hp kan, jadi ini sangat efektif dan harus dipertahankan.⁶⁵

5. Sebar Undangan secara langsung kepada pemilih

Selain yang dibahas di atas sebar undangan secara langsung kepada setiap pemilih juga menjadi salah satu metode yang dilakukan oleh anggota penyelenggara pemilu. Hal ini diyakini akan meningkatkan rasa peduli masyarakat terhadap kegiatan pemilu. Ini diungkapkan dalam waancaranya:

Benar kita juga terjun langsung kelapangan untuk membangikan undangan ke masyarakat, jadi dengan adanya undangan masyarakat terasa terpanggil dan

⁶⁴ Wawancara dengan Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih KIP Aceh Besar. Pada tanggal 11 Juni 2024

⁶⁵ Wawancara dengan Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih KIP Aceh Besar. Pada tanggal 11 Juni 2024

merasa bertanggungjawab untuk hadir, benar saja metode ini mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2019, jadi masyarakat ini harus kita pedulikan secara khusus agar mau ikut berpartisipasi, karena ini sebenarnya kegiatannya menyita waktu kerja mereka kan jadi harus kita arahkan dan kita kasi tau benar-benar fungsi dan tujuan dari kegiatan pemilu ini untuk apa, sejauh ini partisipasi masyarakat meningkat.⁶⁶

Berdasarkan hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi seperti upgrade data pemilih, sosialisasi melalui spanduk dan poster serta sebar undangan secara langsung mampu menyadarkan masyarakat bahwa pemilu itu penting. Hal ini terbukti dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu 2019.

D. Pembahasan

Menurut penulis, hasil dari paparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa, Pemilu Presiden tahun 2019 di laksanakan secara serentak dengan lima jenis surat suara berupa pemilihan Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRA, dan DPRK dan itu dilaksanakan dalam sehari, dan ini Pertama kali terjadi dalam Pemilu Indonesia. Dilihat dari segi persentasenya juga terdapat perbedaan, jika pada pemilihan Presiden 2014 persentase pemilih hanya sebanyak 53% suara saja, sedangkan pada pemilihan umum serentak tahun 2019 terjadi peningkatan yang sangat signifikan dalam jumlah partisipasi politik masyarakat dalam mempergunakan hak suaranya pada pesta demokrasi dengan jumlah persentasenya sebanyak 78,63% suara.

⁶⁶ Wawancara dengan Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih KIP Aceh Besar. Pada tanggal 11 Juni 2024

Adapun tingkat partisipasi politik masyarakat di Aceh Besar pada Pemilu Presiden tahun 2019 jauh lebih meningkat bila dibandingkan dengan partisipasi politik masyarakat pada Pemilu sebelumnya, dari hasil wawancara dengan beberapa responden penulis simpulkan bahwa masyarakat Aceh Besar mulai lebih peka ataupun tingkat kesadaran terhadap politik mulai lebih terbuka, walaupun calon kandidat Presiden tahun 2014 dan 2019 itu sama tidak mempengaruhi keinginan masyarakat untuk ikut serta dalam pemilu. Ini menandakan kesadaran politik masyarakat Aceh Besar lebih meningkat dari sebelumnya.

Dalam menyukseskan pemilu Presiden 2019 Aceh Besar membuat strategi-strategi baru yang berupa membentuk relawan demokrasi, Menyiapkan dan mendistribusikan masa logistik (surat suara) dengan baik sehingga tersebar keseluruh wilayah, membuat rumah pintar pemilu, ini semacam perpustakaan atau laboratorium pemilu yang di gerakkan untuk sosialisasi, Menyiapkan kepastian data masyarakat Kabupaten Aceh Besar dalam pemilihan. Sesuai dengan yang dimaksudkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggara Pemilihan Umum pada Pasal 17 ayat (1) juncto Pasal 26 ayat (1) yang berisi;

- a. Membangun pengetahuan pemilih;
- b. Menumbuhkan kesadaran pemilih;
- c. Meningkatkan partisipasi pemilih;

d. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan masyarakat
Tentang Pemilu

Jadi, dalam pemilihan Presiden tahun 2019 di Aceh Besar bisa dikatakan KIP dianggap sukses dalam menyelenggarakan Pemilu. Kemudian pemilihan Presiden di Aceh Besar tahun 2019 tidak ada terjadinya sengketa apapun serta angka persentase pemilih sebanyak 78,63% yang melebihi dari targer persentase nasional juga merupakan salah satu prestasi yang membuktikan bahwa KIP cukup siap sebagai penyelenggara Pemilu di Aceh Besar.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Bedasarkan pembahasan dan analisa data dalam penelitian tentang Faktor Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu 2019 Aceh Besar, maka pada bab ini diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat Partisipasi dalam pemilu 2019 di Aceh Besar yaitu bersosialisasi tentang hak pilih mereka, selain itu pemikiran yang dibangun di tengah-tengah masyarakat merupakan pemikiran yang kebanyakan mengandung tentang sisi positif tentang pasangan calon, Peran ulama yang menghimbau secara nasional maupun di Aceh secara besar-besaran untuk mendukung pasangan paslon tertentu, Serta Kesiapan KIP Aceh Besar yang dinilai cukup baik. Proses sosialisasi pemilu 2019 di Aceh besar yaitu membentuk relawan demokrasi, Menyiapkan dan mendistribusikan masa logistik (surat suara) dengan baik sehingga tersebar keseluruh wilayah, membuat rumah pintar pemilu, ini semacam perpustakaan atau laboratorium pemilu yang di gerakkan untuk sosialisasi, Menyiapkan kepastian data masyarakat Kabupaten Aceh Besar dalam pemilihan. Sesuai dengan yang dimaksudkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggara Pemilihan Umum pada Pasal 17 ayat (1) juncto Pasal 26 ayat (1)

2. Adapun faktor yang mempengaruhi peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Presiden 2019 di Aceh Besar karena adanya persiapan

KIP Kota Banda Aceh yang telah maksimal dalam menyelenggarakan pemilihan Presiden tahun 2019, Kesadaran masyarakat dalam berpolitik, adanya komunitas organisasi masyarakat, adanya upgrade data pemilih yang dilakukan KIP Aceh Besar dan turun lapangan langsung membagikan undnagan kepada masyarakat.

5.2 Saran

1. Perlu mempertahankan dan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pemilu dan fungsi pemilu kepada masyarakat agar masyarakat tetap peduli kepada kegiatan pemilu yang dilakukan setiap 5 Tahun sekali tersebut.

2. Dalam menyelenggarakan pemilihan Presiden tahun 2019, KIP Aceh Besar bisa dikatakan sukses dalam melaksanakan Pemilu , dan terhadap strategi-strategi yang dilakukan oleh KIP dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat minimal harus dipertahankan, namun akan tetapi untuk Pemilu selanjutnya lebih ditingkatkan lagi kinerjanya baik itu dari segi menyiapkan logistik (surat suara), menyiapkan kepastian data masyarakat Aceh Besar dalam pemilihan serta terus memberikan pemahaman dan pendidikan politik kepada masyarakat tentang pentingnya memilih dalam Pemilihan tersebut.

3. Dalam sosialisasi formal, sebaiknya komisi independent pemilihan lebih bekerja sama dengan mitra dalam menyampaikan produk hukum dan sosialisasi agar terbantu dalam menyampaikan persoalan kepemiluan. Dalam sosialisasi informal, sebaiknya kominsi independent pemilihan lebih rutin dan lebih meningkatkan lagi melakukan pertemuan-pertemuan, keliling-keliling baik di tingkat kecamatan maupun desa, menyebar brosur, berbincang dengan masyarakat atau dengan door to door .

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel A, 1984. *Sosialisasi Kebudayaan dan Partisipasi Politik*, dalam Mochtar Mas'ood & Mac Andrews (Eds), *Perbandingan Sistem Politik* Yogyakarta: UGM University Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayub, A., Razzaq, A., Aslam, M.S., & Iftekhar, H. 2013. *A Conceptual framework on evaluating SWOT analysis as the mediator in strategic marketing planning through marketing intelligence*. *European Journal of Business and Social Sciences*.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Clarkson, Stephen; Pye, Lucian W. 1966. "Aspects of Political Development". *International Journal*. 21 (4): 534.
- Darmadi, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Dewi, M. H., Fandeli, C., & Baiquni, M. 2013. *Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di desa wisata jatiluwih tabanan Bali*. *Kawistara*, Vol 03 No 02
- Gaffar Afan. 2005. *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- <https://dialeksis.com/aceh/ini-dia-temuan-pelanggaran-pemilu-2019-di-aceh/>
- <https://kip.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2021/06/DATA-INFOGRAFIK-PEMILU-SERENTAK-2019-PROVINSI-ACEH-1.pdf>
- Khairuddin. 1992. "Pembangunan Masyarakat Tinjauan Aspek: Sosiologi, Ekonomi, dan Perencanaan", Liberty, Yogyakarta.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2005. *Etika Administrasi Negara*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Maarisit, Y. M. Y. 2015. *Partisipasi politik generasi muda terhadap pembangunan politik di distrik Yalengga Kabupaten Jayawijaya*. *Journal Lyceum*, 3(1),

- Maryanti, M. 2020. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Dilihat Dari Keterwakilan Perempuan Pada Pembangunan Politik di Provinsi Kepulauan Riau*. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 2(1),
- Mubyarto, 1994, IDT : *Program Pembangunan Bukan Proyek Menuju Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan*, P3PK UGM, Yogyakarta.
- Mulyadi, Muhammad. 2009. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Ciputat: Nadi Pustaka.
- Ndraha, Taliziduhu. 1987. *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Bina Aksara.
- Rauf, Maswadi. 2001. *Konsensus dan Konflik Politik: Sebuah Peninjauan Teoritis*, Jakarta: Ditjen Dikti.
- Roring, M. M., Pati, A. B., & Waworundeng, W. 2022. *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Meningkatkan Pembangunan Politik di Desa Singsing Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow*. Jurnal Eksekutif, 2(3).
- Roring, M. M., Pati, A. B., & Waworundeng, W. 2022. *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Meningkatkan Pembangunan Politik di Desa Singsing Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow*. JURNAL EKSEKUTIF, 2(3).
- Ross, Angell. 1967. Partisipasi. <http://Faktor-Faktor Partisipasi.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Praktik.jurnal ilmu dan administrasi dan sosial>. diakses 14 November.
- Setiawan, Afriandi dkk, *Gender dan Pembangunan*, diakses 2011, dalam <https://arifcintaselvia.wordpress.com/kuliah/teori-pembangunan/gender-dan-pembangunan>.
- Sinambela dan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sudarsono, Juwono. 1999. *Pembangunan Politik dan Pembaharuan Politik*. Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif & RND*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung : IKAPI.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Umi, Narimawati., Sri Dewi, Anggadini., Linna, Ismawati. 2011. *Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Pertama, Genesis*. Pondok Gede, Bekasi.